

Tanggapan atas Pertanyaan Anggota Dewan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI bersama Perum Perhutani & PT. Inhutani I sd. V

Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021 - 2022

Jakarta, 24 Januari 2022

NO	NAMA ANGGOTA	PERTANYAAN	TANGGAPAN/JAWABAN
1	Suhardi Duka, MM	<p>1. Bisnis bunga dan sayur di Jawa lagi bagus untuk di ekspor. Luas PHT disewakan 5jt saja dapat 18T, core bisnis PHT banyak yang bocor.</p>	<p>Perum Perhutani mengelola kawasan hutan seluas 2,4 juta hektar yang terdiri dari hutan lindung (636.893,3 Ha), hutan produksi terbatas (394.212,1 Ha) dan hutan produksi (1.403.373,2 Ha). Hutan lindung dan hutan produksi terbatas diprioritaskan untuk fungsi perlindungan. Pemanfaatan pada hutan produksi antara lain untuk hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan dan untuk pemanfaatan multiusaha kehutanan.</p> <p>Perum Perhutani telah mengembangkan bisnis multi usaha kehutanan, di mana komoditas yang dikembangkan antara lain tebu, porang, herbal dengan sistem agroforestry. Pengembangan produk lain, seperti buah-buahan, sayuran, tanaman hias dimungkinkan dengan tetap memperhatikan kesesuaian lahan (fungsi hutan, kemiringan, ketinggian) agar tetap menjamin fungsi hutan dari aspek ekologi, sosial dan ekonomi.</p> <p>Realisasi pengembangan multi usaha kehutanan pada tahun 2021: (1) Tebu seluas 613 Ha; (2) Porang seluas 100 Ha; (3) Herbal seluas 315 Ha. Sesuai dengan RJPP, komoditas ini akan di kembangkan dengan target luas pengembangan s.d tahun 2024 : (1) Tebu seluas 18.256 Ha; (2) Porang seluas 618 Ha; Herbal seluas 1.025 Ha, dengan target pendapatan total pada tahun 2024 sebesar Rp 570,7 Milyar.</p>
		<p>2. Setuju bila pelepasan kawasan hutan untuk Perhutanan Sosial diperuntukan rakyat yang benar, tidak setuju bila untuk rakyat yang tidak benar.</p>	<p>Kami sependapat dalam hal pelepasan kawasan hutan untuk Perhutanan Sosial diperuntukkan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan tinggal di sekitar kawasan hutan.</p>
		<p>3. Untuk kawasan yang direncanakan menjadi Ibu Kota Negara (IKN), harapannya pemanfaatan kayunya dapat dilakukan oleh PT Inhutani I</p>	<p>Dari Lokasi areal IKN yang telah ditetapkan, seluas 42.000 Ha merupakan wilayah perusahaan patungan PT Inhutani I dengan pihak swasta. PT Inhutani I akan melakukan konsultasi dan peninjauan untuk mengajukan permohonan pemanfaatan hasil hutan kayu kepada instansi terkait.</p>

NO	NAMA ANGGOTA	PERTANYAAN	TANGGAPAN/JAWABAN
2	Ir. Dwita Ria Gunadi	1. Pengelolaan hutan oleh Perum Perhutani seharusnya tidak mengabaikan pembangunan kehutanan dan pembangunan yang berkelanjutan. Sebab ada potensi program ini berdampak pada keanekaragaman hayati, polusi, ketahanan pangan, dll.	<p>Perhutani tidak mengabaikan pembangunan kehutanan dan pembangunan yang berkelanjutan. Seluruh dampak dari pengelolaan hutan diidentifikasi dan dibuatkan rencana pengelolannya dalam dokumen DPPL (Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan) pada setiap Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH).</p> <p>Perhutani juga melakukan pemantauan dampak terhadap keanekaragaman hayati yang ada di dalam kawasan hutan Perhutani.</p>
		2. Terkait merger AP : Beberapa daerah di wilayah Indonesia terjadi banjir, bagaimana pengelolaan Perhutani terkait hal tersebut?	<p>Salah satu maksud dan tujuan merger anak perusahaan diantaranya meningkatkan integrasi sistem dan sinergi pemanfaatan hutan, paska merger diharapkan terjadi integrasi dalam pengembangan sistem geospasial melalui penggunaan control room Perhutani Digital Life yang salah satunya dapat memonitor kondisi kawasan hutan secara online berdasarkan tingkat kerentanan terhadap bencana (baik potensi gerakan tanah/longsor maupu potensi banjir), sehingga dengan demikian dapat dilakukan mitigasi risiko bencana dan langkah antisipasi terjadinya bencana di kawasan hutan yang rawan bencana.</p> <p>Disamping itu diharapkan terjadinya sinergi antar induk dan anak perusahaan dalam program: peningkatan tutupan lahan melalui kegiatan penanaman, penerapan reduce impact logging, perlindungan biodiversity, dan monitoring kawasan perlindungan setempat serta High Conservation Value Forest lainnya (HCVF) sehingga dapat meminimalisasi terjadinya bencana dan menjamin kelestarian sumberdaya hutannya.</p> <p>Dalam hal terjadi bencana yang berada di kawasan hutan Perhutani Grup, selama ini selalu ikut berperan aktif dalam membantu penanggulangan bencana dengan mengirimkan petugas tanggap bencana dan berkoordinasi dengan BNPB setempat serta melakukan upaya perbaikan Kawasan hutan (melalui kegiatan reboisasi).</p>
		3. PT Inhutani V agar melakukan bimbingan teknis dan sosialisasi kepada masyarakat terkait proyek-proyek strategis, menurut informasi di Lampung ada penanaman Alpukat seluas 400Ha.	<p>PT Inhutani V siap melaksanakan bimbingan teknis dan sosialisasi bersama dengan komisi IV DPR RI kepada masyarakat sekitar hutan bersama-sama dengan BPDAS Way Seputih Way Sekampung serta PT Inhutani V telah melakukan penanaman Alpukat di Lampung seluas 20 Ha dan akan diperluas menjadi 450 Ha pada tahun 2022.</p>

NO	NAMA ANGGOTA	PERTANYAAN	TANGGAPAN/JAWABAN
3	Alien Mus, S.H.	1. Tolong jelaskan terkait Galian C di pulau Jawa.	Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara di pulau Jawa khususnya di Perum Perhutani yang sudah diberikan ijin Kementerian LHK seluas 3.842,6 Ha atau 0,16% dari keluasan total Kawasan Perhutani, terdiri atas Divisi Regional Jawa Tengah 546,55 Ha, Divisi Regional Jawa Timur 1.382,42 Ha, Divisi Regional Jawa Barat dan Banten 1.913,62 Ha. (Data terlampir).
		2. Perhutani melakukan kerjasama Wisata dengan Masyarakat di areal Hutan produksi yang getahnya disadap. Saya butuh mengetahui nilai pasti PNBPN yang dihasilkan?	Kontribusi PNPB Perum Perhutani kepada Negara meningkat dari tahun ke tahun. Secara total PNBPN tahun 2021 sebesar Rp 79,03 M, sedangkan tahun 2020 sebesar Rp 73,31 M. Sedangkan PNBPN dari produksi getah dan wisata pada tahun 2021 sebesar Rp 5,6 M. mengalami sedikit penurunan dibanding tahun lalu yang mencapai Rp 5,9 M
		3. Sampai saat ini belum ada korelasi data antara KLHK dengan Perum Perhutani terkait pelepasan kawasan Hutan (KHDPK), bagaimana status tenaga kerja bagi SDM yang terdampak KHDPK?	Perum Perhutani selaku BUMN akan mendukung program pemerintah sebagai tindak lanjut UUCK. Sampai saat ini Perhutani terus melakukan koordinasi dengan Kementerian LHK dan Kementerian BUMN untuk keberlanjutan perusahaan.
		4. Terkait carbon trade : Berapa luasnya, berapa dampaknya, bagaimana potensi errornya?	Mengenai Carbon trade, Perum Perhutani masih dalam tahap identifikasi dan menunggu Peraturan Menteri LHK sebagai turunan dari Perpres No 98 tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon. Perum Perhutani telah mengidentifikasi sebanyak 9 calon lokasi Nature Base Solution (NBS) seluas kurang lebih 748 ribu hektar.
		5. Terkait Instruksi Presiden mengenai Sawit: Berapa besar keterlanjuran Sawit di wilayah PT Inhutani V?	Lokasi di Areal PT Inhutani V Bangka terdapat tanaman sawit masyarakat seluas ±2.000 Ha. Saat ini PT Inhutani V telah mengajukan proses persetujuan Naskah Kerjasama Kemitraan (NKK) terhadap 4 KTH (±500 Ha) dan sudah disetujui 1 NKK atas nama Kelompok Tani Hutan (KTH) Alas Tani seluas 68 Ha. PT Inhutani V terus melakukan proses pembentukan KTH untuk melakukan NKK yang akan diajukan persetujuannya ke KLHK.

NO	NAMA ANGGOTA	PERTANYAAN	TANGGAPAN/JAWABAN
4	Julie Sutrisno	1. Concernnya Komisi IV, bagaimana membuat hutan hijau lestari.	Perhutani bekerja berdasarkan Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RPKH) yang disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam pengelolaannya selalu memperhatikan aspek ekologi, ekonomi dan sosial. Membuat hutan hijau lestari juga menjadi concern Perhutani. Oleh karena itu Perhutani melakukan pembibitan, penanaman, pemeliharaan tanaman dan pengamanan hutan serta pembinaan masyarakat sekitar hutan.
		2. Dalam mengelola Hutan, pasal (7): wajib melibatkan masyarakat. Dalam hal ini apakah Perum Perhutani sudah menjalankan pengelolaan hutan dengan melibatkan masyarakat (LMDH), bentuknya seperti apa?	Pelibatan masyarakat sekitar hutan dalam kegiatan pengelolaan hutan sudah dilakukan oleh Perum Perhutani sejak tahun 1972 melalui program prosperity approach. Berikutnya berkembang terus menjadi Pembangunan masyarakat Desa hutan pada tahun 1982, kemudian berkembang menjadi program Perhutanan sosial pada tahun 1984 dan menjadi Pembinaan masyarakat desa hutan terpadu pada tahun 1994, selanjutnya menjelma menjadi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) pada tahun 2001 dimana masyarakat sekitar hutan diwadahi dalam LMDH sebanyak 5.278 LMDH. Pada tahun 2017 dengan terbitnya P.83 dan P.39 maka pelibatan masyarakat berubah menjadi Perhutanan sosial baik dengan Skema Pengakuan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK) maupun izin IPHPS. hingga saat ini terdapat 458 kelompok yang telah mendapatkan kulin KK dan 95 Kelompok yang mendapatkan izin IPHPS.
		3. Banyak masukan dari masyarakat : a. Dampak penanaman Kaliandra tidak memberi nilai tambah kepada masyarakat.	Menanggapi masukan masyarakat: a. Dalam pembangunan Hutan Tanaman Energi (HTE) Perhutani, masyarakat dilibatkan pada kegiatan pembuatan tanaman, pemeliharaan dan pemanenan serta diberikan ruang untuk pemanfaatan kawasan hutan seluas 30% dari keluasan HTE sebagai lahan tumpangsari tanaman pangan. Tanaman Kaliandra juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber pakan lebah (bunganya).
		b. Mengenai pemanfaatan lahan Perum Perhutani untuk penanaman kopi, tidak ada lahan yang lebih luas selain lahan Perum Perhutani sehingga jangan mempersulit masyarakat dalam memanfaatkan lahan tersebut.	b. Dalam kegiatan pemanfaatan kawasan hutan berupa penanaman kopi dibawah tegakan, Perhutani telah memberikan ruang untuk masyarakat dalam menanam kopi. Sampai dengan tahun 2021 luas pemanfaatan untuk budidaya tanaman kopi masyarakat telah mencapai 43.856 Ha dengan melibatkan 116.999 petani hutan.

NO	NAMA ANGGOTA	PERTANYAAN	TANGGAPAN/JAWABAN
4	Julie Sutrisno	<p>3. Banyak masukan dari masyarakat :</p> <p>c. Lahan yang dikelola Perum Perhutani dan PT Inhutani boleh dimanfaatkan untuk kegiatan lainnya. Dalam hal ini Perum Perhutani mendapatkan kompensasi berupa pendapatan. Persoalannya mengenai isu banjir dan longsor. Berapa besar nilai pendapatan lain-lain Perhutani, apakah cukup untuk perbaikan pasca bencana? Ingat kelestarian hutan harus dijaga.</p>	<p>Menanggapi masukan masyarakat:</p> <p>c. Secara prinsip apabila terjadi bencana di dalam Kawasan hutan, Perhutani bertanggung jawab untuk memperbaiki kerusakan Kawasan hutan (reboisasi atau penanaman Kembali terhadap hutan yang rusak).</p>
		<p>d. Perhutanan Sosial menjadi rebutan masyarakat sehingga pengelolaan hutan menjadi tidak kondusif</p>	<p>d. Peran Perhutani dalam program Perhutanan Sosial adalah membantu tim KLHK dalam melakukan verifikasi teknis calon lokasi PS. Kegiatan Perhutani yang dilakukan dalam verifikasi teknis antara lain: sosialisasi, proses identifikasi calon lokasi dan petani/penggarap serta membuat rekomendasi kepada tim kelompok kerja PS. Melalui kegiatan tersebut di atas diharapkan Perhutani ikut menjaga kondusifitas hutan yang menjadi objek Perhutanan Sosial.</p>
		<p>e. Pemerintah daerah, semisal Subang, prihatin dengan lahan yang begitu bagus di kaki Gunung Tangkupan Perahu dan ingin menjadikannya peruntukan tanaman pangan tetapi sulit untuk mendapat izin. Tolong untuk dapat dipertimbangkan. Berikan kesempatan rakyat untuk ikut merasakan manfaatnya.</p>	<p>e. Mengenai penggunaan kawasan hutan untuk tanaman pangan, pemerintah daerah Subang dapat mengajukan kegiatan ketahanan pangan kepada Menteri LHK dengan tembusan ke Perhutani.</p>
		<p>f. Terkait tebu, tidak memiliki aturan yang jelas. Perum Perhutani menciptakan keadaan tidak kondusif di daerah, sehingga membuatnya menjadi pemukiman.</p>	<p>f. Tanaman Tebu yang ada di areal Perhutani dilakukan melalui dua skema yaitu kerjasama ketahanan pangan berdasarkan PermenLHK P.81/2016 dan agroforestry tebu mandiri yang dilakukan Perhutani.</p>

NO	NAMA ANGGOTA	PERTANYAAN	TANGGAPAN/JAWABAN
4	Julie Sutrisno	4. Perselisihan antara rakyat dan Perum Perhutani pada zaman Pak Solihin (sebelum Perum Perhutani ada), mereka diminta untuk menanam tegakan, namun setelah tegakan jadi, diambil oleh Perum Perhutani di wilayah Desa Babakan Asem Conggeang Ujung Jaya.	<p>Telah dilakukan pembahasan mengenai aktivitas yang terjadi tanggal 5 Maret 2014 di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang dengan hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Status Lahan akan diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku. b. Adanya aspirasi masyarakat Desa Babakan Asem tentang penebangan akan dilakukan proses kerjasama dengan bagi hasil 35 % untuk Pemerintah Desa Babakan Asem, 35 % untuk Perhutani, 30 % Untuk dana reboisasi dan akan dilaksanakan bersama antara Perhutani, desa babakan asem & Desa Cacaban c. Selama proses berlangsung keamanan menjadi tanggung jawab bersama. <p>Kejaksanaan Negeri Sumedang telah memberikan legal opinion melalui surat No:08-835/0.2.21/GTN/04/2012 perihal legal opinion atas permasalahan tenurial atau konflik agraria kehutanan di kawasan hutan Perum Perhutani blok Ranca Baren Desa Babakan Asem Kecamatan Conggeang, kabupaten Sumedang terhadap kasus tersebut diatas yang intinya menyatakan bahwa blok tersebut adalah kawasan hutan negara yang pengelolaannya dilakukan oleh Perum Perhutani.</p> <p>Update progress sampai dengan saat ini :</p> <p>Telah dilakukan rapat pembahasan permasalahan kawasan hutan Blok Rancabaren yang dilaksanakan secara virtual (zoom Meeting) pada tanggal 27 Juli 2021, sesuai surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang No. B/4739/HK.04/VI/2021 tanggal 23 Juli 2021 Perihal Rapat Koordinasi Lahan Tegakan dan Kepemilikan Tanah Rancabaren, dengan hasil :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Terkait tuntutan bagi hasil tebangan yang dilaksanakan pada tahun 2020 dari lokasi blok Rancabaren yang terkena trase Jalan Tol Cisumdawu seluas + 19,87 Ha, akan diupayakan melalui musyawarah lebih lanjut antara Perum Perhutani, Pemerintah Desa Babakan Asem dan pihak terkait lainnya dengan di fasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

NO	NAMA ANGGOTA	PERTANYAAN	TANGGAPAN/JAWABAN
4	Julie Sutrisno	4. Perselisihan antara rakyat dan Perum Perhutani pada zaman Pak Solihin (sebelum Perum Perhutani ada), mereka diminta untuk menanam tegakan, namun setelah tegakan jadi, diambil oleh Perum Perhutani di wilayah Desa Babakan Asem Conggeang Ujung Jaya.	<p>b. Terkait status lahan yang selama ini diklaim oleh Pemerintah Desa Babakan Asem sebagai tanah pengangonan dan oleh Bupati Sumedang yang diserahkan pengelolaannya kepada BUMDES Bumi anugrah Desa Babakan Asem dan BUMDES Bumi Asih Jaya Desa Cacaban Kecamatan Conggeang melalui Keputusan Bupati Sumedang No. 522/Kep.266-Dishutbun/2001 dan No. 522.5/Kep.285-Dishutbun/2001 tanggal 5 Oktober 2001, terlebih dahulu akan dilakukan verifikasi dan penelaahan data yuridis dan data fisik oleh BPKH Wilayah XI Yogyakarta, untuk menentukan alternatif langkah penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.</p> <p>c. Sebagai bahan verifikasi dan telaahan, Pemda Sumedang akan menyampaikan dokumen/bukti -bukti yang mendasari klaim terhadap kawasan hutan Blok Rancabaren kepada BPKH Wilayah XI Jogjakarta.</p> <p>d. Pemerintahan Kabupaten Sumedang dalam penanganan permasalahan Blok Rancabaren Desa Babakan Asem pembahasan lebih lanjut akan di buat FGD (Focus Group Discussion).</p>
5	Yessy Melania, SE	<p>1. Menurut informasi, pada Desember tahun 2021 ada penandatanganan MoU di wilayah Kalimantan Barat antara PT Inhutani III dan mitra, apakah MoU ini terkait bioenergi atau yang lain?</p> <p>2. Lahan yang produktif agar dikelola oleh PT Inhutani (Pinus)</p> <p>3. Produksi getah Pinus masih luar biasa namun harga jual masih rendah bila dibandingkan dengan dijual di Semarang. Harga getah pinus di swasta sekitar Rp 15 ribu, harga yang diberikan PT Inhutani III lebih rendah.</p>	<p>PT INHUTANI III berencana mengembangkan tanaman biomassa dan telah membuat MoU pada tanggal 20 Desember 2021 dengan pihak swasta untuk membangun hutan tanaman energi seluas 5000 Ha di kabupaten Melawi dan Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.</p> <p>Potensi tegakan pinus yang ada seluas ±250 ha, saat ini dikelola secara produktif dengan bekerjasama dengan mitra swasta UMKM UD Tiga Saudara dengan melibatkan tenaga kerja lokal sebagai penyadap.</p> <p>Harga yang diterima oleh penyadap di lapangan merupakan upah penyadapan bukan merupakan harga jual getah pinus, sehingga lebih rendah dari pada harga jual getah pinus.</p>

NO	NAMA ANGGOTA	PERTANYAAN	TANGGAPAN/JAWABAN
5	Yessy Melania, SE	4. Data tegakan Pinus yang masih produktif dan tidak agar disamakan dengan yang ada di Kabupaten agar meminimalkan konflik di masyarakat.	<p>Sebagian besar potensi tegakan pinus yang produktif dan sudah disadap saat ini berada di Kabupaten Melawi yaitu Desa Nusa Pandau, Desa Mulung, Desa Sebaju, Desa Semadin, Desa Berambay, Desa Pakuk, Desa Pelinggang dan Desa Bina Jaya.</p> <p>Potensi pinus yang tidak produktif berada di Kabupaten Sintang posisinya tersebar sehingga tidak feasible untuk diproduksi karena memakan biaya angkut yang cukup besar.</p>
		5. Pola kerjasama dengan masyarakat seperti apa?	Pola kerjasama sadapan getah pinus dengan masyarakat sekitar hutan PT Inhutani III dilakukan dengan mekanisme pengelolaan getah bekerjasama dengan mitra swasta dengan melibatkan tenaga kerja lokal sebagai penyadap.
6	Drh. H. Slamet	1. Setelah UUCK, hutan bukan lagi milik negara, tetapi hutan milik Pemerintah. Kaitannya dengan itu maka pemanfaatan hutan tergantung pemerintah. Jika menggunakan hitungan untung-rugi, sebagai pengelola profesional, Saya yakin Perum Perhutani tidak setuju dengan program KHDPK. Maka Komisi IV harus tegas memberikan kepastian terkait KHDPK.	Perum Perhutani selaku BUMN akan mendukung program pemerintah sebagai tindak lanjut UUCK. Sampai saat ini Perhutani terus melakukan koordinasi dengan Kementerian LHK dan Kementerian BUMN untuk keberlanjutan perusahaan.
		2. Terkait program KulinKK butuh penjelasan realisasinya, termasuk agroforestry. Sampaikan kepada KPH Sukabumi saat reses akan saya kunjungi dan lihat, apakah program agroforestry sudah berjalan baik.	Terima kasih atas atensi Bapak terhadap KPH Sukabumi dan kami akan sangat senang sekali menerima kunjungan Bapak di KPH Sukabumi. Sebagai gambaran awal, Agroforestry KPH Sukabumi tahun 2021 mencapai Rp 790 juta dengan komoditas terbesar adalah padi yang mencapai nilai Rp 741 Juta, Kopi Rp. 18 Juta serta komoditas lain senilai Rp. 30 Juta.
		3. Terkait lahan lahan kosong, bagaimana Langkah-langkah secara rinci untuk melakukan kerjasama dengan masyarakat?	<p>Mekanisme kerjasama dengan masyarakat dalam mengatasi lahan kosong di Perhutani adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perhutani merencanakan untuk melakukan penanaman pada lahan kosong melalui Rencana Teknik Tahunan (RTT). Dalam pelaksanaannya Perhutani mengajak Lembaga Masyarakat Desa Hutan untuk bekerjasama melalui kontrak pembuatan tanaman. Dalam pembuatan tanaman, masyarakat diberikan ruang untuk menanam tanaman pangan/semusim dengan sistem tumpangsari.

NO	NAMA ANGGOTA	PERTANYAAN	TANGGAPAN/JAWABAN
6	Drh. H. Slamet	4. Sehubungan dengan permintaan dukungan Komisi IV terkait KHDPK bentuknya seperti apa?	Perum Perhutani selaku BUMN akan mendukung program pemerintah sebagai tindak lanjut UUCK. Sampai saat ini Perhutani terus melakukan koordinasi dengan Kementerian LHK dan Kementerian BUMN untuk keberlanjutan perusahaan.
7	Anggia Erma Rini, M.K.M.	1. Berikan info sampai sejauh mana diskusinya dengan KLHK?	Perum Perhutani telah berproses bersama KLHK terkait rencana implementasi KHDPK dimulai dari arahan Menteri LHK untuk fokus pada bisnis yang produktif. Selanjutnya Menteri BUMN memberikan arahan kepada Perhutani untuk memperhatikan aset yang telah tercatat dalam neraca perusahaan dan keuangan negara serta penanganan SDM. Perhutani menyampaikan kriteria-kriteria areal yang masuk ke dalam KHDPK sebagai bahan telaah KLHK. Rencana implementasi program Perhutanan Sosial di Perhutani juga mendapat respon positif dari KBUMN dengan bersuratnya Menteri BUMN kepada Menteri LHK terkait dukungan atas Implementasi Program Perhutanan Sosial. Menteri LHK menyambut baik hal tersebut dengan menyampaikan kepada Menteri BUMN terkait Rencana Tindak Lanjut Kelola Hutan oleh Perum Perhutani. Selanjutnya menunggu keputusan penetapan KHDPK oleh Kementerian LHK.
		2. Terkait kerjasama tebu dengan PTPN di Tulungagung tidak teralisasi (0%), agar dicek.	Dari luasan 2.696 Ha untuk izin lokasi ketahanan pangan Tebu yang diberikan Menteri LHK kepada mitra di wilayah KPH Blitar, baru sekitar 4 Ha yang terealisasi. Hal ini dikarenakan adanya ketidaksesuaian lahan, aksesibilitas lokasi sulit dan kondisi sosial masyarakat di lokasi yang tidak kondusif.
8	Luluk Nur Hamidah, M.Si.,M.P.A.	1. Dari aset Perhutani senilai 17,2 Triliun seberapa besar manfaat yang sudah diterima oleh masyarakat? Karena ada paradoks “dimana ada hutan, disana pasti ada kemiskinan”.	Aset senilai 17,2 T tersebut terdiri atas aset Biologis berupa tegakan hutan senilai Rp.12,94 T dan di luar aset biologis senilai Rp.4,26 T. Dari kawasan hutan, sepanjang tahun 2021 tercatat kontribusi Perhutani terhadap masyarakat sekitar hutan berkisar Rp. 1,45 T. yang terdiri atas agroforestry, wisata, Sharing Kyu & Hasil Hutan Bukan Kayu, serta Upah Tenaga Kerja.

NO	NAMA ANGGOTA	PERTANYAAN	TANGGAPAN/JAWABAN
8	Luluk Nur Hamidah, M.Si.,M.P.A.	2. Luasan Hutan yang dikuasai oleh Perhutani, jika kurang dari 2,4 juta Ha. Seharusnya tetap bisa jadi perusahaan kelas Dunia, masalah yang dihadapi Perhutani apa? Apakah banyaknya aspek politis sehingga menghambat kinerja Perhutani, ini berhubungan dengan dukungan Komisi IV terhadap Perhutani terutama PP 23/2021 terkait KHDPK.	Dengan luasan yang berkurang Perhutani akan berfokus pada kayu (daur pendek, menengah, panjang), hasil hutan bukan kayu (getah, gondorukem, terpentin dan derivatnya), minyak kayu putih, pengembangan agroforestry (tebu, porang, herbal), biomasa, rebranding wisata dan pengembangan carbon trade.
		3. Terus terang saya khawatir terkait pasca UUCK ada konsekuensi lain yg tidak kalah besar yaitu Pemutusan Hubungan Kerja. Pesan dari salah satu pegawai Perhutani lewat whatsapp "ibu kalau hutan kami diminta bagaimana nasib rekan-rekan kami?"	Permasalahan SDM masih terus dikoordinasikan dengan Kementerian LHK dan Perhutani berkomitmen untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan.
9	Ir. KRT. H. Darori Wonodipuro, M.M.	1. Dalam undangan diminta penjelasan terkait dampak UUCK, pasal 29 (A) dan (B), PS dapat dilaksanakan pada Hutan produksi dan Hutan Lindung. Kalau bisa direkomendasi jangan di Hutan Lindung. Karena ancamannya besar terhadap kelestarian lingkungan	Perhutani berkomitmen untuk menjaga kelestarian hutan lindung dengan segera melakukan rehabilitasi terhadap hutan lindung yang rusak. Perhutanan sosial pada hutan lindung akan dititik beratkan pada pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan jasa lingkungan.
		2. UUCK : Penutupan lahan 30% dicabut. Sebelum dicabut saja tutupan lahan di Jawa di bawah 20%, dikhawatirkan jika dicabut maka tutupan lahan semakin berkurang.	Saat ini Perum Perhutani mengelola lahan hutan seluas 2,4 Juta Ha di Pulau Jawa dan Madura atau lebih kurang 19% terhadap luas Pulau Jawa.
		3. Sebagai TL UUCK PP 23/2021 : Saya membayangkan kondisi Perhutani, seharusnya tidak dibebani profit, dibebani nanam hutan saja udah bagus.	Pada prinsipnya kami sependapat dengan pernyataan ini, namun demikian mengingat Perum Perhutani merupakan salah satu BUMN yang harus mengacu kepada undang-undang BUMN No 19 tahun 2003. Pasal 2 ayat 1 butir b bahwa maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah mengejar keuntungan.
		4. Lahan hutan jangan dilepas tanpa ada kejelasan yang megelola.	Perum Perhutani selaku BUMN akan mendukung program pemerintah sebagai tindaklanjut UUCK. Sampai saat ini Perhutani terus melakukan koordinasi dengan Kementerian LHK dan Kementerian BUMN untuk keberlanjutan perusahaan

NO	NAMA ANGGOTA	PERTANYAAN	TANGGAPAN/JAWABAN
10	Ir. H. Hanan Rozak, M.S.	1. Apakah tugas Perum Perhutani yang sudah disampaikan sudah dilaksanakan dengan baik?	<p>Dalam melaksanakan tugas mengelola Kawasan hutan, Perum Perhutani telah mendapatkan pengakuan bahwa tugas pengelolaan hutan telah dilaksanakan secara lestari baik dari aspek produksi, sosial dan lingkungan yang dibuktikan dengan perolehan sertifikat pengelolaan hutan Lestari baik standar nasional maupun internasional.</p> <p>Berdasarkan standar nasional penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang dilakukan setiap tahun oleh Lembaga independent dengan hasil:</p>
			<p>a. Sertifikasi PHPL Perum Perhutani.</p> <p>Sertifikat Perum Perhutani diberikan kepada tiga Divisi Regional dengan predikat BAIK dan berlaku hingga 2027.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nomor Sertifikat PHPL Divisi Regional Jawa Tengah : 040.4/EQC-PHPL/V/2021 • Nomor Sertifikat PHPL Divisi Regional Jawa Timur : 041.5/EQC-PHPL/V/2021 • Nomor Sertifikat PHPL Divisi Regional Jawa Barat dan Banten : 039.5/EQC-PHPL/V/2021
			<p>b. Sertifikasi PHPL Anak Perusahaan</p> <p>1. PT. Inhutani I, terdiri dari 10 unit manajemen yang tersertifikasi PHPL dan masih berlaku hingga 2024 meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – UMH Pimping, dengan Nomor Sertifikat : 04-PHPL-006 – UMH Meraang, dengan Nomor Sertifikat : 12-SIC.04.01 – UMH Gowa Maros, dengan Nomor Sertifikat : 55-SIC-04.01 – UMHTLong Nah, dengan Nomor Sertifikat : 56-SIC-04.01 – UMH Segah Hulu, dengan Nomor Sertifikat : 44-SIC-04.01 – UMH Sambarata, dengan Nomor Sertifikat : 08-PHPL-006 – UMH Labanan, dengan Nomor Sertifikat : 01-PHPL-006 – UMH Pangean, dengan Nomor Sertifikat : 03-PHPL-006 – UMHTI Batuampar - Mentawir, dengan Nomor Sertifikat : 16-PHPL-006 – UMH Kunyit-Simendurut, dengan Nomor Sertifikat : 05-PHPL-006

NO	NAMA ANGGOTA	PERTANYAAN	TANGGAPAN/JAWABAN
10	Ir. H. Hanan Rozak, M.S.	1. Apakah tugas Perum Perhutani yang sudah disampaikan sudah dilaksanakan dengan baik?	b. Sertifikasi PHPL Anak Perusahaan 2. PT. Inhutani II, terdiri dari 4 unit manajemen yang tersertifikasi PHPL dan masih berlaku meliputi: – UMHT Tanah Grogot, dengan Nomor Sertifikat : 017.5/EQCPHPL/XI/2019 – UMHT Pulau Laut, dengan Nomor Sertifikat : 010.6/EQC-PHPL/VI/2021 – UMHT Malinau, dengan Nomor Sertifikat : 006.6/EQC-PHPL/IV/2021 – UMHT Sei Tubu, dengan Nomor Sertifikat : 41-SIC-04.01 3. PT. Inhutani V, terdiri dari 4 unit manajemen yang tersertifikasi PHPL dan masih berlaku meliputi – UMH Bangka, dengan Nomor Sertifikat : 040.SPHPL,019-IDN – UMH Lampung, dengan Nomor Sertifikat : 039.SPHPL.019.IDN
			Perum Perhutani juga menerapkan standar Pengelolaan Hutan Lestari tingkat internasional yang dikeluarkan oleh Forest Stewardship Council (FSC). Sertifikasi FSC ini terdiri dari Sertifikasi FSC Forest Management (FSC FM) dan FSC Controlled Wood (FSC CW). Pemantauan implementasi standar ini dilakukan oleh lembaga independen setiap tahun dengan penilikan terkini dilaksanakan pada tahun 2021. aspek penilaian kinerja meliputi legal compliance (Prasyarat), Perencanaan, Produksi, Ekologi/Lingkungan dan Sosial.
			Sertifikat Forest Stewardship Council (FSC) yang diperoleh Perum Perhutani sebagai berikut : a. Sertifikat FSC Forest Management dengan nomor Sertifikat : SGS-FM/COC-010716 berlaku sampai dengan 18 Mei 2026 di KPH Banten, KPH Ciamis, KPH Kendal, KPH Cepu, KPH Randublatung, KPH Kebonharjo dan KPH Madiun. Tahun 2021 dalam proses perluasan ruang lingkup sertifikasi untuk HHBK Getah Pinus dan Kayuputih pertama di Indonesia dan tahun 2022 akan menambahkan ruang lingkup Hutan tanaman Energi untuk mensuplai produk produk wood pellet FSC dari Indonesia b. Sertifikat FSC FSC Controlled Wood, Sertifikasi FSC Controlled Wood dimulai sejak tahun 2013 untuk 49 KPH yang belum mendapatkan FSC Forest Management dengan Nomor : SGS-CW/FM-010314 masih berlaku sampai dengan 19 Desember 2024.

NO	NAMA ANGGOTA	PERTANYAAN	TANGGAPAN/JAWABAN
10	Ir. H. Hanan Rozak, M.S.	1. Apakah tugas Perum Perhutani yang sudah disampaikan sudah dilaksanakan dengan baik?	<p>Khusus untuk Industri Kayu Perum Perhutani juga telah mendapatkan Sertifikat Chain of Custody (lacak balak) standar FSC juga sudah ada untuk 3 industri kayu di Perhutani, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pabrik Industri Kayu Gresik (Nomor sertifikat SA-COC-012767; berlaku sampai dengan 6 Januari 2024) • Pabrik Industri Kayu Brumbung (Nomor sertifikat SA-COC-012768; berlaku sampai dengan 4 Februari 2024) • Pabrik Industri Kayu Cepu (Nomor sertifikat SA-COC-012769; berlaku sampai dengan 31 Mei 2024)
			<p>Selain sertifikasi terhadap pengelolaan hutan secara lestari dan Industri kayu secara lestari, Perum Perhutani juga sudah mempunyai sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 dengan Nomor: MUTU-QMS/147 dan masa berlaku sampai dengan 3 Maret tahun 2023 untuk 8 ruang lingkup, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Produksi getah pinus - Produksi gondorukem, terpentin dan derivatnya - Produksi kayu olahan (RST, vinir, lamella, dan produk-produk moulding) - Produksi kayu lapis - Layanan penyelenggaraan diklat dan asesmen - Layanan pengelolaan bisnis optimalisasi asset (penyewaan penginapan, pusat olah raga, aula dan ruang pertemuan) - Layanan penyediaan akomodasi (penginapan, fasilitas perkemahan, dan sarana prasarana lain untuk turis) - Penelitian dan pengembangan.

NO	NAMA ANGGOTA	PERTANYAAN	TANGGAPAN/JAWABAN
10	Ir. H. Hanan Rozak, M.S.	2. Mohon dijelaskan kondisi PT Inhutani di Lampung, hampir 100% sudah dijarah (register 44 & 45)	PT Inhutani V memiliki konsesi seluas 72.130 Ha, saat ini kondisinya sebagai berikut: a. Seluas 56.547 Ha berada di provinsi Lampung, terdiri dari 4 register yaitu register 18 seluas 1.390 Ha, register 42 seluas 12.729 Ha, register 44 seluas 32.373 Ha dan register 46 seluas 10.055 Ha. Untuk register 44 seluas 32.373 Ha, seluas 758 Ha dikerjasamakan PT PSMI dan seluas 7000 Ha dikerjasamakan dengan masyarakat Adapun sisanya seluas 24.615 Ha (76%) dikuasai oleh masyarakat. b. Seluas 15.583 Ha berada di provinsi Bangka Belitung yaitu register 11 seluas 7.063 Ha dan register 12 seluas 8.520 Ha
		3. Bisnis nya harus ada kaitannya dengan Inhutani tapi harus ada kayu-kayuan. Tanaman tebu yang menanam perambah (illegal)	Sesuai RKT tahun 2022 direncanakan penanaman karet seluas 5.788 Ha, Sengon 2.241 Ha, tanaman multiusaha kehutanan yang sudah dikembangkan antara lain jengkol seluas 37 Ha di register 42 dan register 44, Alpukat 7 ha di register 18. Ke depannya direncanakan akan ditanami Alpukat seluas 450 Ha..
		4. Perhutanan Sosial itu kalau bisa diprioritaskan lahan-lahan yang diduduki masyarakat	Pada saat ini PT Inhutani V telah mengajukan persetujuan NKK terhadap 2 KTH yang berada di register 18 dan saat ini sedang menunggu proses verifikasi teknis dari tim KLHK.
11	H. Sulaeman L. Hamzah.	1. Perhutanan Sosial adalah agenda presiden, dan hutan harus dikelola secara lestari: 1. jangan sampai menimbulkan bencana, 2. manfaat untuk rakyat, 3. profit untuk BUMN	Perhutani sepenuhnya patuh atas regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, salah satunya terkait Perhutanan Sosial <ul style="list-style-type: none"> Perhutani selama ini telah melaksanakan pengelolaan hutan secara lestari dan diawasi oleh para pihak terutama stakholder yang peduli terhadap lingkungan Dalam pengelolaannya, Perhutani telah mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari untuk 10 KPH dari FSC
		2. Aspek pengelolaan hutan harus bisa menjawab aspek eko, profit dan lingkungan.UUCK ada catatan terkait dengan HL, HL tidak bisa ditawar-2 karena HL sebagai tata air, mencegah bencana.	Pada kawasan hutan dengan fungsi hutan lindung berdasarkan ketentuan/peraturan masih dapat dikelola dan dimanfaatkan secara terbatas dan tetap memperhatikan kaidah-kaidah konservasi Kawasan

NO	NAMA ANGGOTA	PERTANYAAN	TANGGAPAN/JAWABAN
11	H. Sulaeman L. Hamzah.	2. Aspek pengelolaan hutan harus bisa menjawab aspek eko, profit dan lingkungan.UUCK ada catatan terkait dengan HL, HL tidak bisa ditawar-2 karena HL sebagai tata air, mencegah bencana.	<p>Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi pasal 108 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung dilakukan dengan Multiusaha Kehutanan terdiri atas : <ul style="list-style-type: none"> a. Pemanfaatan Kawasan; b. Pemanfaatan Jasa Lingkungan; dan/atau c. Pemungutan HHBK. • Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> a. Tidak mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya; b. Tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi; c. Tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; d. Tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam; e. Tidak merusak keseimbangan unsur-unsur lingkungan; f. Hanya memungut HHBK yang sudah tersedia secara alami dan/atau hasil rehabilitasi; dan g. Memungut HHBK sesuai jumlah, berat, atau volume yang diizinkan
		3. Perum Perhutani diharapkan menjadi model pengelolaan bersama masyarakat, ada model pelestarian ekologis dan dengan pengelolaan ini perusahaan untung.	<p>Perhutani dalam melakukan pengelolaan hutan selalu memperhatikan aspek ekologi, ekonomi dan sosial. Perhutani juga selalu mengikutsertakan masyarakat, termasuk dalam upaya pelestarian ekologis dan sosial budaya. Perhutani dan masyarakat telah melakukan identifikasi kawasan hutan yang bernilai penting bagi kelestarian ekologis serta sosial budaya masyarakat setempat. Kawasan-kawasan tersebut kemudian ditetapkan sebagai kawasan bernilai konservasi tinggi (KBKT).</p> <p>Perhutani tetap berpegang pada prinsip keberlanjutan dimana kami meyakini bahwa keuntungan perusahaan hanya akan didapat apabila pengelolaan hutan dilakukan secara lestari.</p>
12	Drh. H. Samet	Adakah usulan galian C yang dieksekusi yang tidak melalui pertimbangan teknis Perhutani?	Sesuai regulasi yang berlaku yaitu Permen LHK no 7 tahun 2021 (sebelumnya Permen LHK no 27 tahun 2018), Pertimbangan Teknis Perum Perhutani merupakan salah satu syarat teknis dalam pengajuan persetujuan penggunaan kawasan hutan.

Realisasi pembayaran PNBP

NO	JENIS PNBP	TAHUN					JUMLAH
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	PSDH						
	Kayu	53,305	60,128	62,548	63,551	62,946	302,477
	Non Kayu	1,414	3,569	4,145	4,136	4,344	17,608
	Agroforestry	2,095	1,360	2,071	3,812	10,422	19,761
	Total PSDH	56,813	65,057	68,764	71,500	77,712	339,846
2	Retribusi Wisata	1,901	1,653	2,847	1,813	1,320	9,535
	TOTAL PNBP	58,715	66,710	71,612	73,312	79,032	349,381

Dalam Juta Rupiah

Kontribusi terhadap perekonomian masyarakat

NO	JENIS KONTRIBUSI	TAHUN					JUMLAH
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Agroforestry	54,030	196,061	124,204	150,096	190,754	715,145
2	Wisata	153,192	261,035	368,282	259,843	205,840	1,248,193
	Total	207,222	457,096	492,486	409,939	396,595	1,963,338

Dalam Juta Rupiah

Realisasi pembayaran Pajak

NO	JENIS PAJAK	TAHUN					JUMLAH
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Pajak Penghasilan (PPh)						
	Pasal 21	20,252	41,126	36,247	25,741	34,294	157,660
	Pasal 22	1,002	1,610	1,544	2,206	3,157	9,519
	Pasal 23	6,597	7,972	10,744	8,149	11,234	44,695
	Pasal 24	2,063	2,506	2,472	3,046	2,857	12,944
	Pasal 25	62,697	134,907	254,766	76,605	67,040	596,014
	Total PPh	92,610	188,121	305,773	115,747	118,582	820,833
2	PPN	168,269	233,519	204,929	210,951	274,843	1,092,511
3	PBB	65,602	354,139	119,448	222,855	185,605	947,647
	TOTAL PAJAK (1+2+3)	326,481	775,779	630,149	549,553	579,029	2,860,991

Dalam Juta Rupiah

Data Galian C di Perhutani

No	KPH	Jumlah	Perusahaan	Peruntukan	Total
1	BANDUNG SELATAN		Akarna Marindo, PT	Pertambangan Bahan Galian C	20.00
			Bhumivarin Mineral Indonesia, PT	Operasi Produksi Batu Gamping	2.33
			Kibar Sarimukti, CV	Penambangan Batu Gamping	9.61
			Shanghyang Mineral, PT	Penambangan Bahan Galian C (Batu Gamping)	6.80
			TOTAL	4	38.74
2	BANTEN		Alfa Granita, PT	Pertambangan Andesit	37.28
			Lebak Lestari Minergi, PT	Pertambangan Andesit	16.79
			Mulyo Mukti, PT	Operasi Produksi Batu Andesit (galian C)	62.71
TOTAL	3	116.78			
3	BOGOR		Holcim Indonesia Tbk., PT	Pertambangan Batu Kapur	259.72
			Indocement Tunggul Prakarsa, PT	Pertambangan Batu Galian C	712.48
			Koperasi Karya Mandiri Nunggal Sejahtera	Penambangan Batu Kapur	6.83
			Lumbang Mineral Sentosa, PT	Operasi Produksi Bahan Galian Galena	9.04
			Sofa Nugraha, PT	Operasi Produksi Batu Andesit dan Pasir	15.97
			Wijaya Karya Beton Tbk., PT	Operasi Produksi Batu Andesit	9.95
TOTAL	6	1,013.99			
4	CIANJUR		Mandala Marmer Indonesia, PT	Operasi Produksi Batuan Gamping	72.00
TOTAL	1	72.00			
5	INDRAMAYU		Alfadh Putra Mandiri, PT	Operasi Produksi Mineral Non Logam/ Galian C	9.00
			Banyuresmi Artha, PT	Penambangan Pasir	20.51
			Koperasi Keluarga Kasepuhan Sejahtera	Operasi Bahan Galian C (Pasir)	4.30
TOTAL	3	33.81			
6	MAJALENGKA		An-Nakhl, CV	Operasi Produksi Batu Trass	8.00
			Karya Wangi Sagara, PT	Penambangan Batu Andesit	8.10
			Koperasi Pondok Pesantren Al-Hikmah	Operasi Produksi Batu Alam dan Trass (Galian C)	9.10
			Koperasi Pondok Pesantren Al-Ishlah	Operasi Produksi Batu Alam (Galian C)	12.00
			TOTAL	4	37.20
7	PURWAKARTA		Batu Cemerlang Andalan, PT	Operasi Produksi Batu Andesit	19.40
			Bumi Cikeupeul Abadi, PT	Tambang Batu Andesit	24.27
			Gunung Kecapi, PT	Operasi Produksi Batu Andesit (galian C)	5.10
			Mandiri Sejahtera Sentra, PT / (Handi Perkasa, PT)	Operasi Produksi Bahan Galian Andesit	25.00
			Nusantara Swadesi Mining, PT	Penambangan batu andesit (Galian C)	12.46
			Selo Agung, PT	Operasi Produksi Batu Andesit	11.03
			Trimahesa Cakrawala, PT	Pertambangan Andesit	10.30
TOTAL	7	107.56			
8	SUKABUMI		Tambang Semen Sukabumi, PT	Pertambangan galian C	493.54
TOTAL	1	493.54			
TOTAL JAWA BARAT & BANTEN		29			1,913.62
9	Balapulang		PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	Operasi Produksi Batu Gamping	95.6066
				Operasi Produksi Batu Kapur	54.5286
TOTAL	2	150.14			
10	Banyumas Barat		PT. Sinar Tambang Artha Lestari	Operasi Produksi Batu Gamping	100.10
TOTAL	1	100.10			
11	Kebonharjo		CV. Pahala Maha Jaya PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	Operasi Produksi Pasir Kuarsa	2.95
				Operasi Produksi Pasir Kuarsa	118.58
TOTAL	2	121.53			
12	Mantingan		PT. Semen Gresik (Persero) Tbk/ PT. Semen Indone	Operasi Produksi batuan tanah liat	132.15
TOTAL	1	132.15			
13	Pati		KSU Panca Marga	Eksplorasi Feldspar	5.57
TOTAL	1	5.57			
14	Pemalang		Wiwit Kular Sukses	Pertambangan Operasi Priduksi Galian C (Pasir)	5.67
TOTAL	1	5.67			
15	Semarang		PT. SEMEN GROBOGAN	Operasi Produksi Batu Gamping	31.40
TOTAL	1	31.40			
TOTAL JAWA TENGAH		9			546.55
16	Blitar		Ponpes Jawaakhirul Hikmah	Galian C (batu gamping)	5.00
					5.00
17	Kediri		CV Tripurwita Jaya Abadi	Galian C (batu feldspar)	3.40
			PT. IMIT	Penambangan Batu Marmer	23.00
			PT. Kualii Mas	Galian C (batu feldspar)	4.13
			PT. Talenta Multi Kreasi Indonesia (TMKI)	Penambangan Tanah Urug	63.00
			TOTAL	4	93.53
18	Nganjuk		Bupati Nganjuk	Borrow Area, Quarry dan Pemindahan Jalan	242.33
TOTAL	1	242.33			
19	Pasuruan		PT Agung Satrya Abadi	Penambangan Batu dan Pasir	7.14
			PT Pendawa Lestari Perkasa	Galian batu andesit (batu pecah)	9.35
TOTAL	2	16.49			
20	Tuban		PT. Semen Dwima Agung	Bahan baku Semen	71.30
			PT. Semen Gresik	Bahan baku Semen (Batu Kapur)	532.20
			Semen Indonesia (Persero) Tbk	Penambangan Batu Kapur	421.58
TOTAL	3	1,025.08			
TOTAL JAWA TIMUR		11			1,382.42
TOTAL PERHUTANI		49			3,842.60

Luas Kawasan Perhutani **2,437,087.62**

Proporsi terhadap luas kawasan hutan Perhutani 0.16%

Materi Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI bersama Perum Perhutani & PT. Inhutani I sd. V

Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021 - 2022

Jakarta, 18 Januari 2022

Dewan Pengawas



Ketua Dewas
BAMBANG HENDROYONO


- Organ Dewan Pengawas**
- Komite Audit
 - Komite Manajemen Risiko
 - Komite Remunerasi



Anggota
NOER FAUZI RACHMAN



Anggota
BAMBANG RISYANTO



Anggota
CHALID MUHAMMAD



Anggota
KOMARUDDIN



Anggota
YB PRIYATMO HADI

Direksi



Direktur Utama
WAHYU KUNCORO

- Unit Kerja / Bisnis**
- 3** Divisi Regional
 - 57** KPH



Direktur
Perencanaan dan Pengembangan
ENDUNG TRIHARTAKA



Direktur
Komersial
AHMAD IBRAHIM



Direktur
Operasi dan Perhutanan Sosial
NATALAS ANIS HARJANTO



Direktur
Keuangan dan Manajemen Risiko
KEMAL SUDIRO



Direktur SDM, Umum & IT
M. DENNY ERMANSYAH

Inhutani I



Inhutani II



Inhutani III



Inhutani IV



Inhutani V



**DEWAN
KOMISARIS**

**Direktur Utama
OMAN
SUHERMAN**



**Direktur
SUSILO BUDI
WACONO**



**Direktur
BAKHRIZAL
BAKRI**



**Direktur
HEZLYSYAH
SIREGAR**



**Direktur
SRI WIDODO**




**Direktur Utama
DICKY YUANA
RADY**



**Direktur
TRIANOM
WAHYUDI**



**DEWAN
DIREKSI**

An aerial photograph of a dense, lush green forest. A paved road with white lane markings winds through the center of the forest. Several vehicles, including a yellow truck and a white car, are visible on the road. A large, semi-transparent green graphic shape is overlaid on the left side of the image, containing white text.

**Profil Pengelolaan
Sumber Daya Hutan
Perhutani**

Berdasarkan **PP No. 72 tahun 2010** tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara adalah dasar pelaksanaan pengelolaan sumber daya hutan di Jawa dan Madura oleh Perum Perhutani, dan sesuai **PP No.73 tahun 2014** Perum Perhutani ditunjuk sebagai Induk Holding BUMN Kehutanan (Perhutani Group).



1 Kawasan Hutan

Total Luas Kawasan Perhutani Group **3.657.326 Ha**
(2,9 % luas Hutan Indonesia 125,92 Juta Ha)

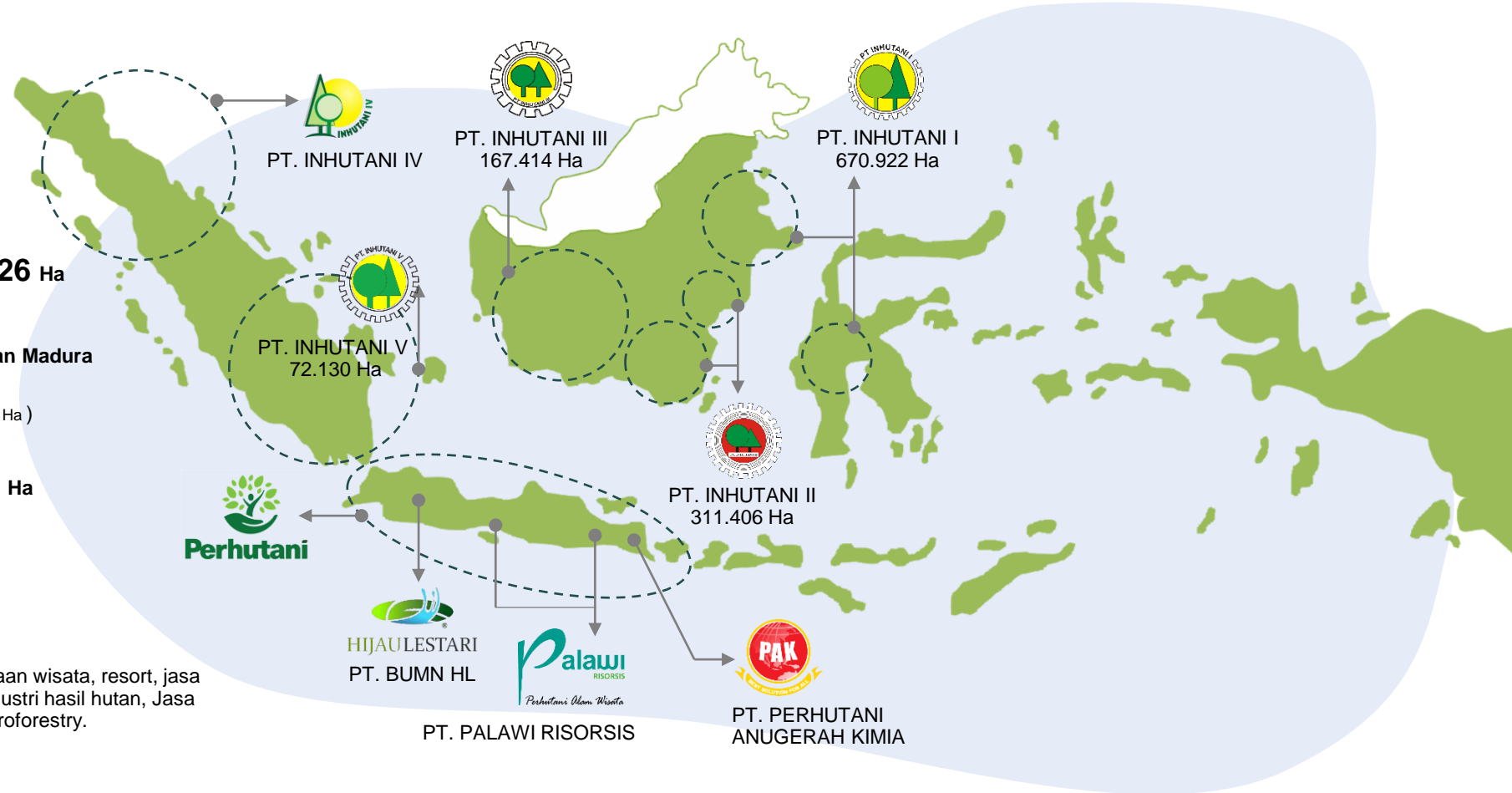


- ▶ Hak Pengelolaan Hutan Jawa dan Madura **2.435.454 Ha**
(1,9% luas Hutan Indonesia 125,92 Juta Ha)
- ▶ Pemegang Izin Pengelolaan Hutan Luar Jawa **1.221.872 Ha**

2 Others



- ▶ Holding usaha dibidang pengelolaan wisata, resort, jasa penyediaan tiket tour & travel, industri hasil hutan, Jasa Rehabilitasi dan perdagangan agroforestry.



Regulasi dan Areal Kelolaan

PP No. 72 tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara adalah dasar "**hak pengelolaan**" sumber daya hutan di Jawa dan Madura oleh Perum Perhutani

Luas Hutan Kelolaan Perum Perhutani 2.434.454,6Ha dan Anak Perusahaan 1.221.872 Ha

- Hutan Produksi (HP) 1.403.373,2 Ha → 58%
- Hutan Produksi Terbatas (HPT) 394.212,1 Ha → 16%
- Hutan Lindung (HL) 636.893,3 Ha → 26%

Total hak kelolaan Perhutani Konsolidasi seluas 3,6 Jt Ha setara 2,9% luas Hutan Indonesia 125,92 Juta Ha

Rp 17,2 T*

Aset yang tercatat merupakan Aset Tetap dan **Aset Tegakan Pohon sesuai PSAK 69 "Agrikultur"** yang berada pada areal HP dan HPT dengan kelas hutan penghasil kayu dan hasil hutan bukan kayu.

Unit Kerja

3 Divisi Regional
57 KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan)
425 BKPH (Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan)
1.596 RPH (Resort Pemangkuan Hutan)



Tugas Utama

Sebagaimana Pasal 3 ayat (1) PP 72 tahun 2010 "Pemerintah melanjutkan penugasan kepada Perusahaan untuk melakukan **Pengelolaan Hutan di Hutan Negara yang berada di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten, kecuali hutan konservasi**, berdasarkan prinsip pengelolaan hutan lestari dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik"



VISI

"Menjadi Perusahaan Pengelola Hutan Berkelanjutan dan Bermanfaat Bagi Masyarakat"

MISI

- ▶ Mengelola Sumber Daya Hutan secara lestari (**PLANET**)
- ▶ Peduli kepada kepentingan masyarakat dan lingkungan (**PEOPLE**)
- ▶ Mengoptimalkan bisnis kehutanan dengan prinsip *Good Corporate Governance* (**PROFIT**)

Tenaga Kerja*

17.957
Orang



Portofolio Produk*

LOG KAYU 986rb M3	GETAH PINUS 85rb Ton GTD 74 rb Ton	PRODUK INDUSTRI KAYU 46.714 M3
MINYAK KAYU PUTIH 345 Ton	EKOWISATA 8,9 Juta Pengunjung	LAINNYA (Madu, Kopi, dan Produk Agrobisnis)

Model bisnis utama diperoleh dari penjualan kayu dan getah pinus, dengan ***batasan produksi kayu di regulasi oleh Permen LHK sebagai upaya menjaga hutan jawa tetap lestari.**

**Data Unaudited 2021*

Karakteristik Pulau Jawa & Madura sebagai wil. Kerja

- Jawa merupakan pusat pemerintahan, perekonomian, perindustrian.** Sebagai posisi strategis Pulau Jawa dibutuhkan infrastruktur dan sarana-prasarana yang memadai, termasuk adanya jaminan bebas dari bencana alam yang seringkali diakibatkan oleh kerusakan hutan
- Pulau Jawa merupakan pulau terpadat di Indonesia.** Berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2019, dari jumlah penduduk Indonesia sebanyak 265.015.300 jiwa, sebanyak 149.635.600 jiwa (56,46%) mendiami P. Jawa
- Pulau Jawa dengan berbagai karakteristiknya **membutuhkan keberadaan hutan dan lingkungan dengan kondisi yang baik dan dikelola secara lestari**, yg dapat dijadikan sebagai instrumen mitigasi bencana alam, pengaturan tata air, & penyeimbang ekosistem serta sebagai pelestari keanekaragaman hayati
- Interaksi dan ketergantungan penduduk desa hutan dengan kawasan hutan dinilai cukup tinggi.** Penduduk memanfaatkan kawasan hutan untuk lahan pertanian semusim melalui tumpang-sari, mengambil kayu bakar, mengumpulkan rumput/daun pakan ternak, menggembalakan ternak dll

■ Audited 2019 ■ Audited 2020 ■ RKAP 2021 ■ Unaudit ed 2021 ■ RKAP 2022

Consolidated NET INCOME

Audited 2019
Rp 205 M Yoy 73%

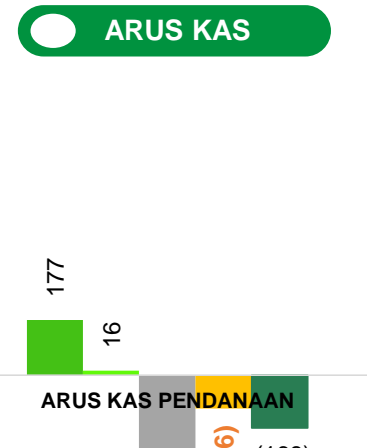
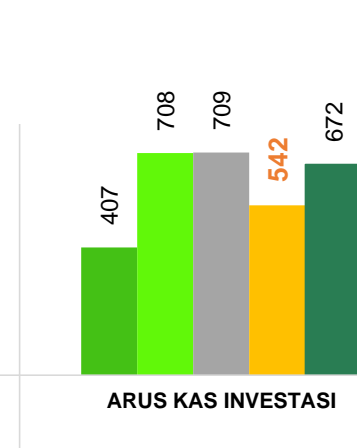
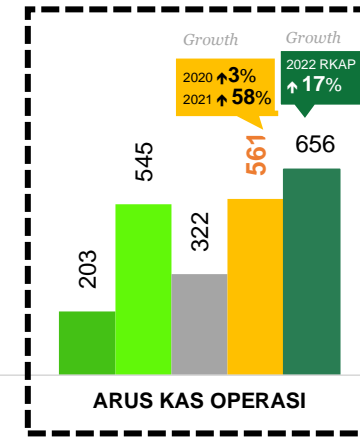
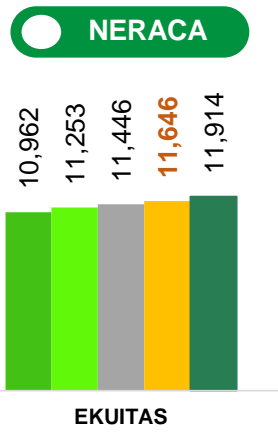
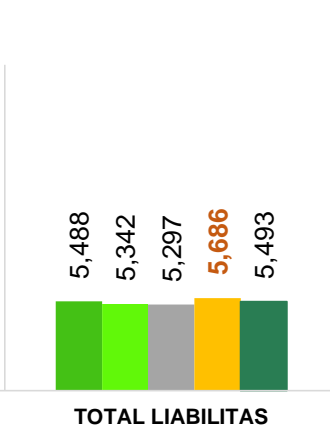
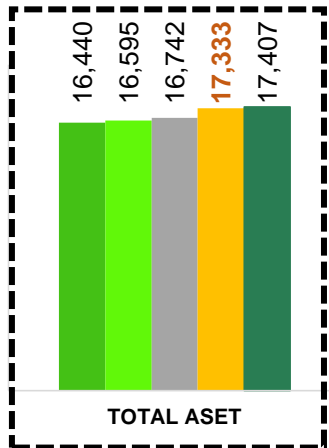
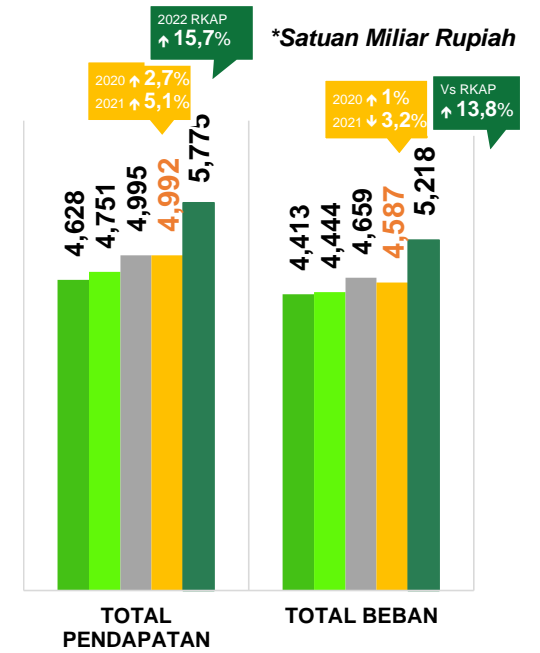
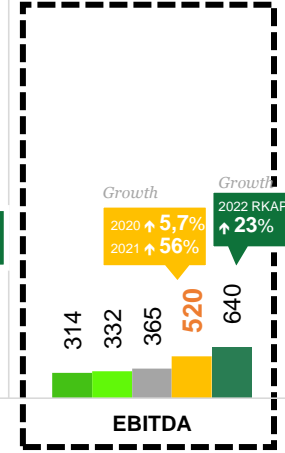
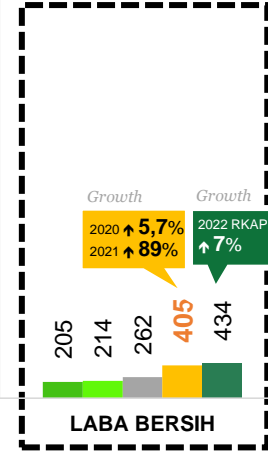
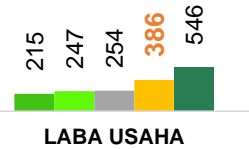
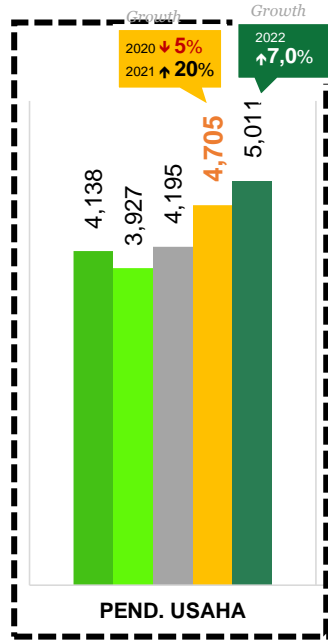
Audited 2020
Rp 214 M Yoy 4%

Unaudited 2021
Rp 405 M Yoy 89%

Rencana 2022
Rp 434 M Yoy 107%

RKAP 154%

Seluruh parameter keuangan tumbuh

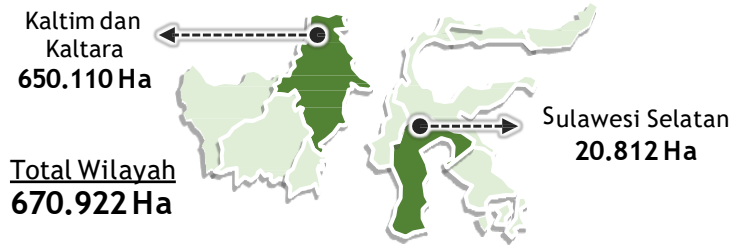


1. Pengelolaan Hutan Pasca-UUCK



Berdiri sejak 1973, yang pada tahun 2014 diserahkan ke Perhutani sesuai PP No.73 tahun 2014

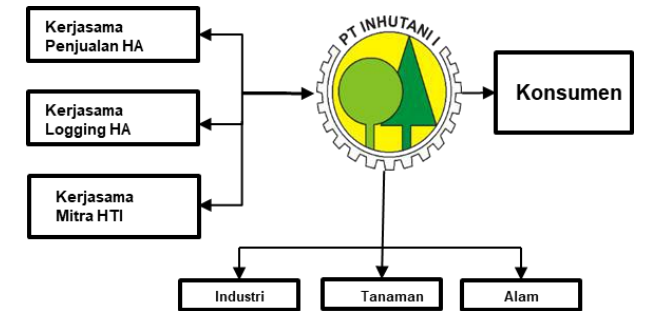
1 Brief Overview



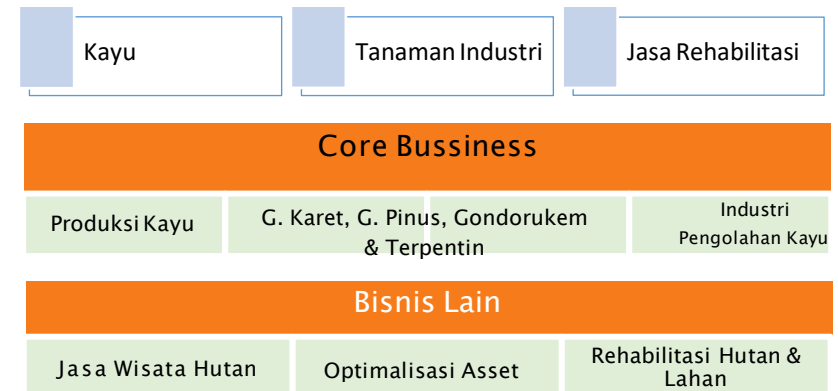
2 Struktur Kepemilikan



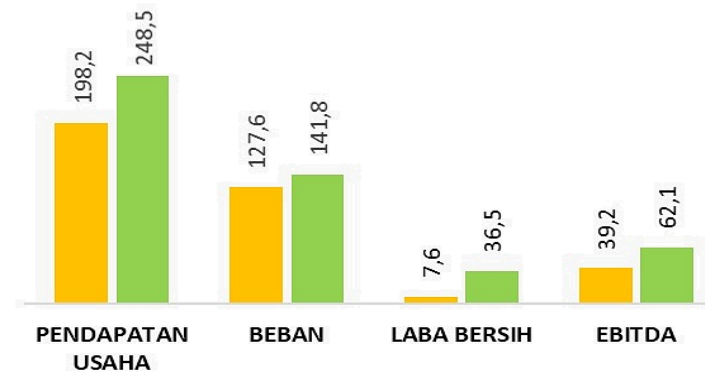
3 Bussiness Model



4 Portofolio Bisnis



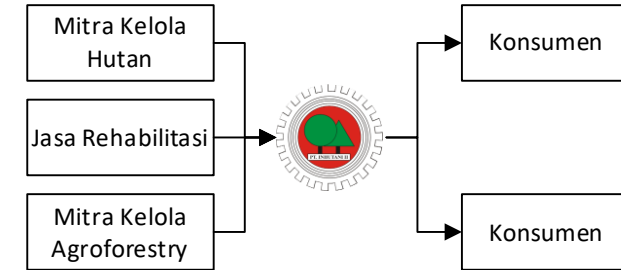
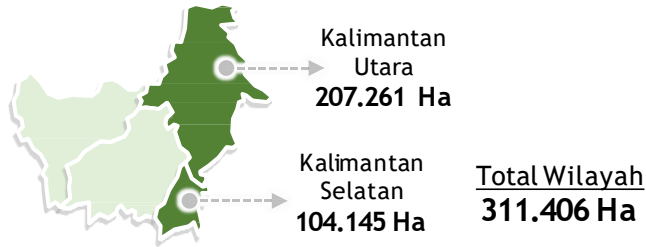
5 Kinerja Keungan



■ 2020 Audited ■ 2021 Un Audited

Berdiri sejak 1974 sesuai PP No.32 /1974, yang pada tahun 2014 diserahkan ke Perhutani sesuai PP No.73 /2014

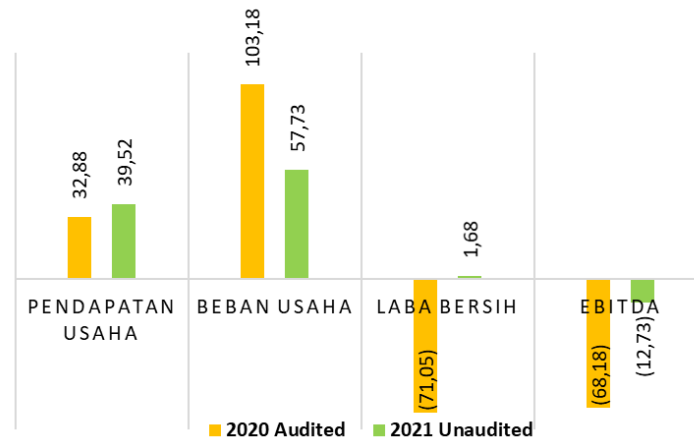
1 Brief Overview **3 Business Model**



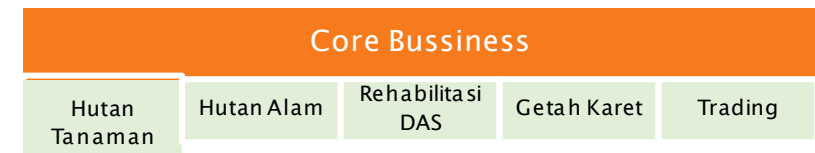
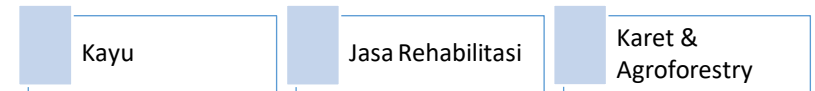
2 Struktur Kepemilikan

Perhutani
100%

5 Kinerja Keuangan

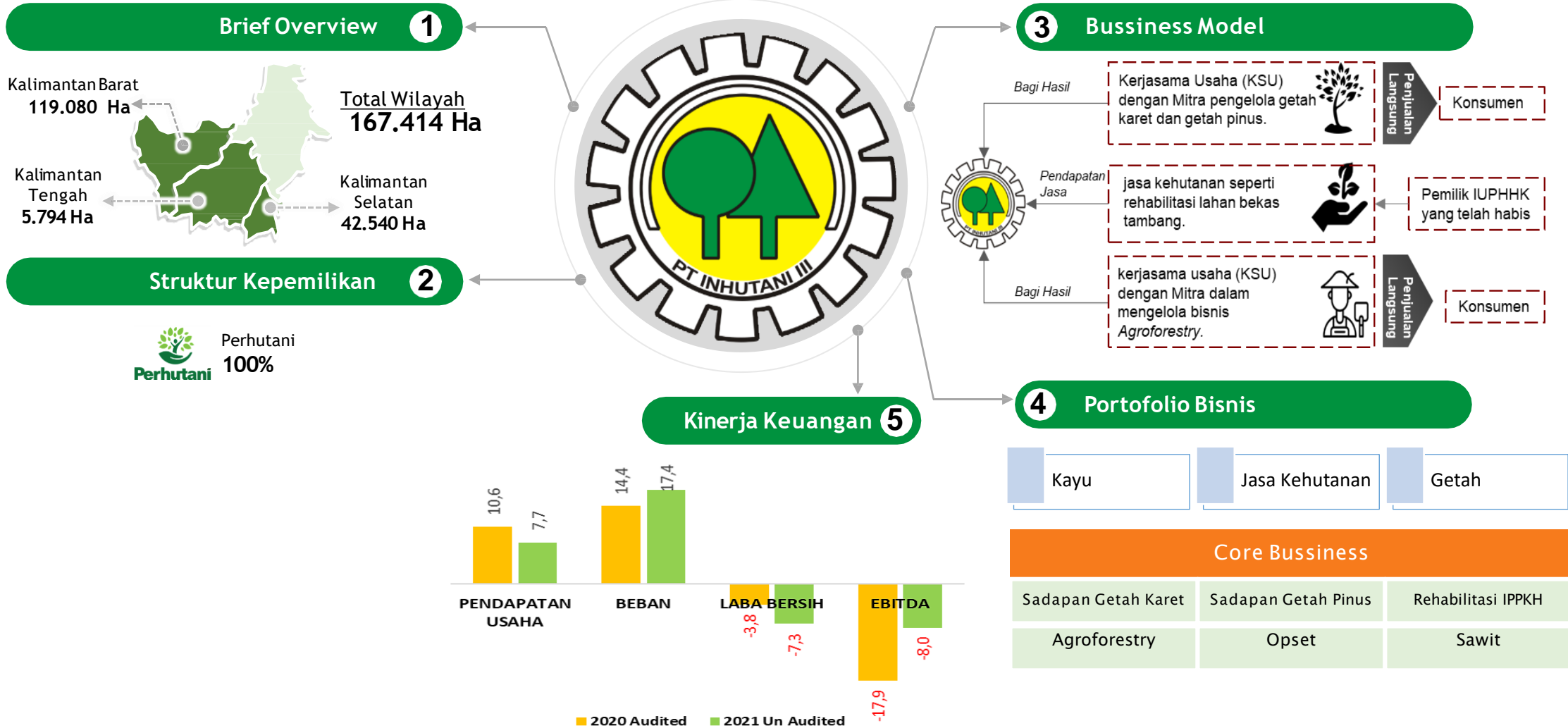


4 Portofolio Bisnis



PT. INHUTANI III

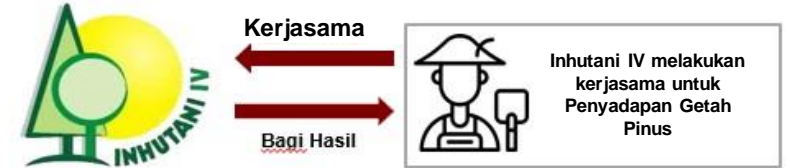
Berdiri sejak 1974 sesuai PP No.31 /1974, yang pada tahun 2014 diserahkan ke Perhutani sesuai PP No.73 /2014



PT. INHUTANI IV

Berdiri sejak 1991 sesuai PP No.22 /1991, yang pada tahun 2014 diserahkan ke Perhutani sesuai PP No.73 /2014

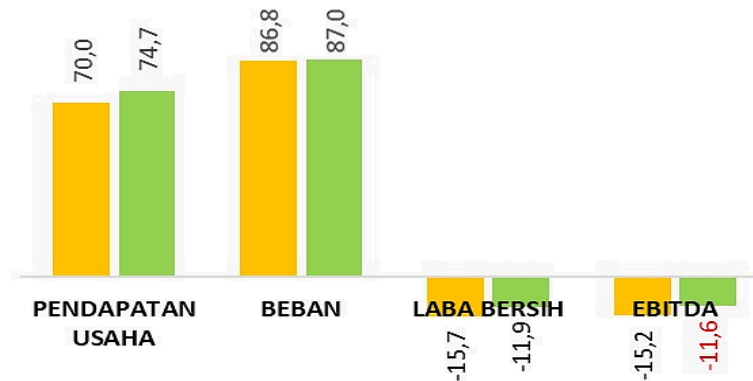
1 Brief Overview 3 Bussiness Model



2 Struktur Kepemilikan



Kinerja Keuangan 5



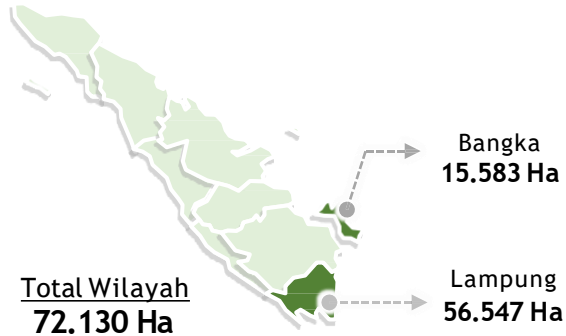
4 Portofolio Bisnis



PT. INHUTANI V

Berdiri sejak 1991, yang pada tahun 2014 diserahkan ke Perhutani sesuai PP No.73 /2014

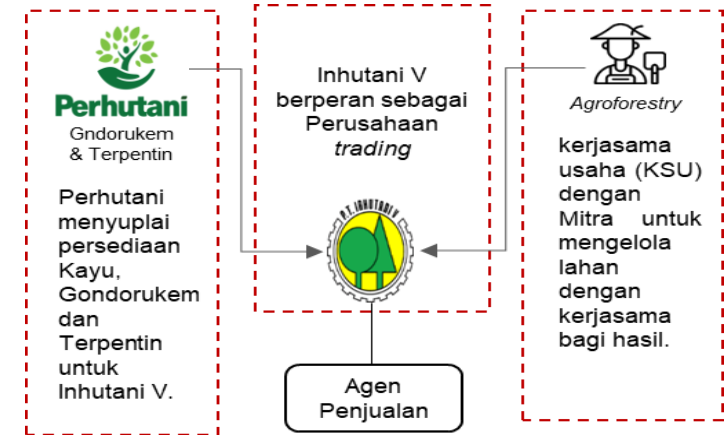
1 Brief Overview



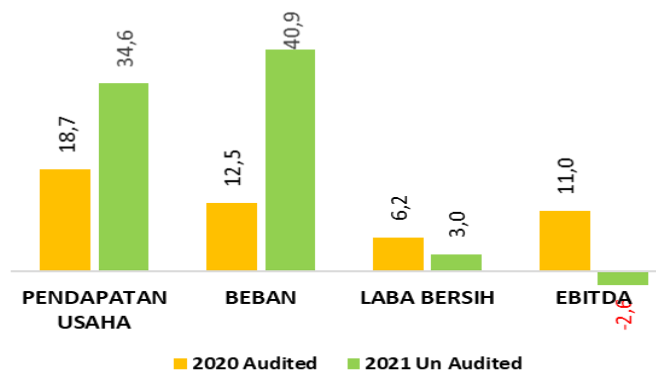
2 Struktur Kepemilikan

Perhutani **100%**

3 Bussiness Model



5 Kinerja Keuangan



4 Portofolio Bisnis



a. Rencana Pengembangan Usaha melalui Multi Usaha Kehutanan



Th. 2022

Perum Perhutani merencanakan 9 Proyek Strategis yang merupakan lanjutan dari proyek strategis tahun 2021, terdiri dari

- 2 Proyek merupakan 88 Proyek Strategis KBUMN dan
- 7 proyek Inisiatif Internal Perhutani, dimana sebagian proyek adalah kelanjutan dari proyek strategis tahun 2021.

Related Party :

Progress sd. saat ini : telah selesai laporan Final kajian oleh konsultan PT. Bahana. Usulan penggabungan PBPH sudah dikirim ke Menteri LHK. **Telah dikirimkan surat permohonan persetujuan Likuidasi PT. BUMN HL I kepada Menteri BUMN tanggal 3/09/2021 dan Surat Permohonan Persetujuan Merger IHT I-V, & PAK tanggal 28/09/2021**

02

Perhutani Subsidiaries Reorganization
 Q1 – Maret 2022

Related Party :

Tujuan :

- Melanjutkan Pembangunan pabrik biomassa di IK Brumbung (*wood chip mikro & wood pellet*)
- Mulai pembangunan pabrik biomassa rembang cofiring (*sawdust*)

04

New Factory dan Komersialisasi Produk Biomassa
 Q2 – Juni 2022

Related Party :
 Sinergi BUMN, Swasta

Tujuan : Pengembangan aksi mitigasi perubahan iklim sebagai upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di lingkup BUMN melalui Proyek Nature-Based Solution (NBS)

06

Pengembangan Proyek Nature Base Solutions (NBS)
 Q3 – Sept 2022

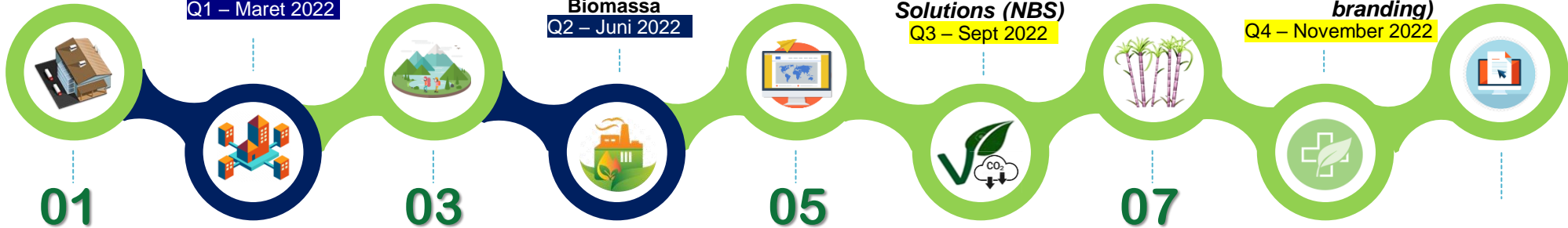
Related Party :

Tujuan : Optimalisasi Penyerapan pasar Produk Herbal (Panen dan Pengolahan hasil herbal Kerjasama pemasaran dengan BUMN Farnasi dengan melakukan *Co-branding*)

- Luas tanaman 2022 seluas 424,5 Ha (Pemeliharaan tanaman serai wangi dan kapulaga th.2021 268,4 Ha dan tambahan penanaman th.2022 156,1 Ha) Hilirisasi/pabrik serai wangi dan simplisia

08

Pengembangan Produk olahan herbal (co branding)
 Q4 – November 2022



01

Sinergi Industri Kayu
 Q1 – Februari 2022

Related Party :
 Sinergi BUMN, Swasta

Tujuan:

- Penguatan Hilirisasi Industri Kayu Perhutani
- Kerjasama/Join Venture dan/atau akuisisi dengan *private sector*/BUMN
- Kerjasama dengan Asosiasi, UMKM, dan mitra strategis lainnya"

03

Ekstensifikasi Rebranding Wisata Alam
 Q2 – April 2022

Related Party :
 1) Kemenparekraf, 2) BSN, 3) Bank BUMN, 4) Vendor E-ticketing, 5) Mitra Wisata

Tujuan :
 Ekstensifikasi 5 program rebranding wisata alam pada 15 lokasi

05

Implementasi Digitalisasi Pemetaan & Pengamanan SDH
 Q3 – Agustus 2022

Related Party :

Tujuan : Implementasi Teknologi Informasi untuk menunjang operasional (Pengembangan Aplikasi Geospasial di 57 KPH dan Pembangunan Control Room di 3 Kantor Divisi Regional)

07

Pengembangan Agroforestry Tebu
 Q4 – Oktober 2022

Related Party :

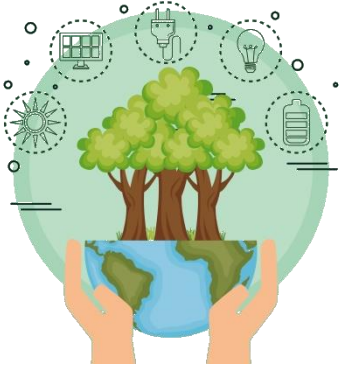
Tujuan : Berkontribusi dalam kolaboratif ketahanan pangan melalui sinergi BUMN dan optimalisasi pendapatan perusahaan (Penambahan luas tanaman tebu seluas 5.141 Ha, Pemeliharaan 613 Ha, sehingga **Total tanaman tebu 5.755 Ha**)

09

Transformasi Digital Sistem Informasi, Back Office, & Shared Service
 Q4 – Desember 2022

Related Party :

Tujuan : Implementasi Teknologi Informasi untuk menunjang operasional (Implementasi ERP Modul *Production & Planning* dan Modul *Sales & Distribution, CRM* dan *Digital Signature* serta Pengembangan *Workspace Management & Ecotourism Platform*)



Multi Usaha kehutanan

Penerapan beberapa kegiatan usaha Kehutanan berupa usaha Pemanfaatan Kawasan, usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu dan/atau usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan untuk mengoptimalkan Kawasan Hutan pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

(Permen LHK No. 8/2021)



1
New Biomass Factory



2
Agroforestry Tebu Mandiri



3
Agroforestry Porang Mandiri



4
Tanaman Herbal



5
Agroforestry Buah-buahan
(Alpukat, Durian, Kelengkeng, dll)



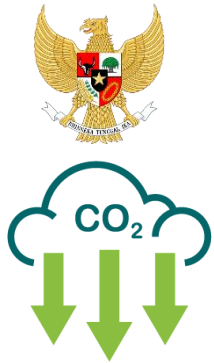
6
Nature Based Solution (Dekarbonisasi)



7
Pengelolaan Wisata & Jasa Lingkungan



8
Optimalisasi Produk Unggulan Existing :
Jati Plus Perhutani (JPP),
Pinus Bocor Getah dan Kayu Putih Klon Unggul



1

Program Strategis Nasional dalam rangka Target Penurunan Emisi Nasional sebesar 29%-41% by 2030, dan **Net Zero Emission 2060**

2

Sesuai RJPP 2020 – 2024 Perhutani telah merencanakan luasan Hutan Tanaman Energi (**HTE**) seluas **59rb ha sd. 2024**, data sd. Des **2021** telah tertanam seluas **31rb ha**

3

Head of Agreement (HoA) Perhutani dengan PLN untuk **supply Biomassa** **PLTU Rembang dan PLTU Pelabuhan Ratu** 31 Mei 2021 - 30 Mei 2023

4

Pembangunan Industri Biomassa Perhutani di 3 lokasi (Brumbung Semarang, Pelabuhan Ratu Sukabumi dan Rembang)

Tebu Mandiri

Lokasi :
KPH Jombang dan KPH Ngawi

Rencana : 613, 83 Ha
 Realisasi : 613, 83 Ha



Porang Mandiri

Lokasi :
KPH Saradan dan KPH Nganjuk

Rencana : 100,2 Ha
 Realisasi : 100,2 Ha



Tanaman Herbal

Lokasi :
KPH Bandung Utara, KPH Banyumas Timur,
KPH Bogor, KPH Cianjur, KPH Kedu Utara,
KPH Majalengka, KPH Sukabumi, dan KPH
Telawa

Rencana : 315,5 Ha
 Realisasi : 315,5 Ha

Jenis Herbal :
Jahe Merah, Jahe Putih, Kapolaga, Kencur,
Kunyit, Seraiwangi



A Pengertian

Nature based solutions (NBS) atau solusi berbasis alam adalah **solusi yang mengacu pada pengelolaan dan penggunaan alam yang berkelanjutan untuk mengatasi tantangan sosial lingkungan**. Tantangan tersebut meliputi masalah-masalah seperti perubahan iklim, keamanan air, polusi air, ketahanan pangan, kesehatan manusia, hilangnya keanekaragaman hayati, dan manajemen risiko bencana. [wikipedia]

B Amanah



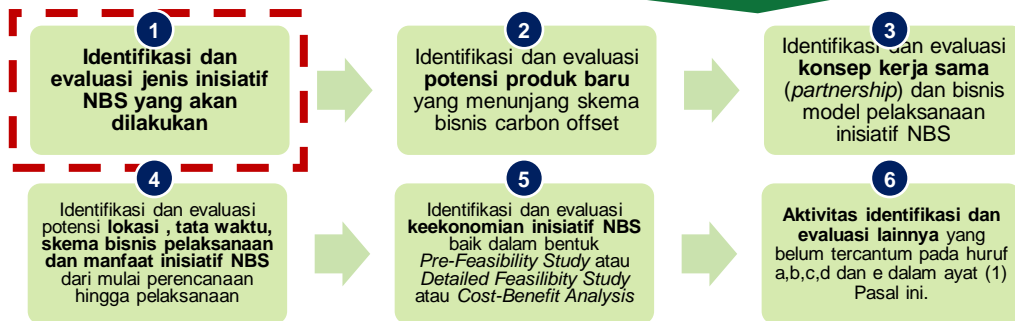
Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-273/MBU/08/2021 tanggal 18 Agustus 2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan Implementasi Dekarbonisasi di BUMN dalam rangka mendukung Netral Karbon 2060

C Nota Kesepahaman

Telah ditandatangani Nota Kesepahaman Kerja Sama Potensi Inisiatif dan Ekosistem *Nature Based-Solutions* (NBS) untuk Program Dekarbonisasi antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) dan Perum Perhutani pada tanggal **31 Desember 2021** (MoU Nomor SP-27/C00000/2021-SD)

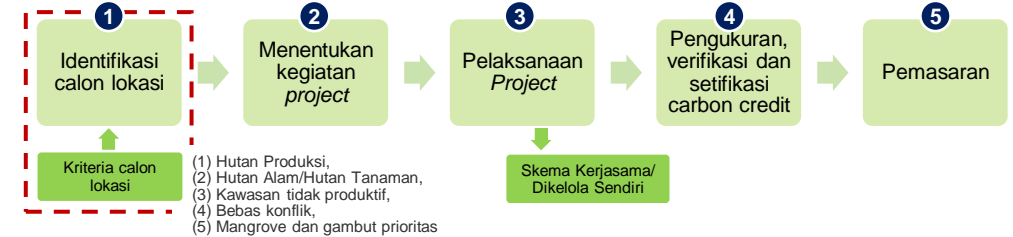


D Ruang Lingkup Nota Kesepahaman



E Update Rencana Proyek NBS Perhutani Group

→ Roadmap *Nature Based Solutions* (NBS) tahun 2022 Perhutani Group



→ Identifikasi calon lokasi project NBS di wilayah Kerja Perhutani Group

▪ **Kriteria identifikasi awal** : luas areal, lokasi, vegetasi, trend deforestasi selama 20 tahun terakhir, pola penggunaan lahan saat ini, dan faktor lain yang meliputi faktor ekonomi, teknis dan non teknis.

▪ **Hasil Identifikasi : 16 (enam belas) calon lokasi proyek NBS** (lokasi lahan patungan/JV).

No	Anak Perusahaan	Lokasi	Luas [Ha]
1	PT. INHUTANI I	HA Labanan	138.210
2	PT. INHUTANI I	HA Kunyit Simendurut	120.760
3	PT. INHUTANI I	HA Samarata	106.020
4	PT. INHUTANI I	HA Merang	70.700
5	PT. INHUTANI I	HA Segah Hulu	54.230
6	PT. INHUTANI I	HA Pangean	50.230
7	PT. INHUTANI I	HA Pimping	45.480
Jumlah Inhutani I			585.630
8	PT. INHUTANI II	HA Semamu	71.375
9	PT. INHUTANI II	HA Seitubu	91.510
Jumlah Inhutani II			162.885
Total Anak Perusahaan			748.515

Carbon Offset.Asia

No	Anak Perusahaan	Cucu Perusahaan	Lokasi	Luas [Ha]	Ownership
1	PT. INHUTANI I	PT ITCI Kayan Hutani	Bulungan, Kaltara	325.000	31%
2	PT. INHUTANI I	PT Intracawood Man.	Bulungan, Kaltara	211.156	25%
3	PT. INHUTANI I	PT Gema Hutani Lestari	Pulau Buru, Maluku	148.450	20%
Jumlah Inhutani I				684.606	
4	PT. INHUTANI II	PT Ratah Timber	Kalimantan Timur	93.425	20%
5	PT. INHUTANI II	PT Segara Indochem	Kalimantan Timur	85.725	20%
6	PT. INHUTANI II	PT Gunung Gajah Abadi	Kalimantan Timur	74.980	23%
7	PT. INHUTANI II	PT Roda Mas Kalimantan	Kalimantan Timur	69.620	20%
Jumlah Inhutani II				323.750	
Total Cucu Perusahaan				1.008.356	

▪ Saat ini dilakukan *assessment* lanjutan terhadap keenambelas calon lokasi dimaksud melalui pengisian kuesioner oleh Anak Perusahaan.

E Dukungan Kementerian LHK



Percepatan penerbitan Permen LHK sebagai tindak lanjut Perpres No.98 tahun 2021 tentang **"Nilai Ekonomi Carbon"**

Wisata Perum Perhutani

Total Obyek Wisata Perhutani | **843** Lokasi



Pengunjung Wisata 2021

8,9Juta orang*

Pendapatan 2021

Rp 142,4 M*



35 lokasi dikelola Mandiri
808 lokasi dikelola secara Kerjasama



Menyerap Tenaga Kerja
5.847 org
Petugas dan Non Petugas Wisata

b. Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus untuk Program Perhutanan Sosial

Kondisi Eksisting

1. Total Luas Area Kerja Perum Perhutani sebesar **2.435.928 Ha**,
2. Organisasi Perum Perhutani terdiri dari :
 - 57 KPH
 - 427 BKPH
 - 1596 RPH
3. Total Karyawan Perum Perhutani sebanyak **17.957 orang**
4. Berdasarkan RKAP tahun 2022, potensi hasil hutan Perum Perhutani sebagai berikut :
 - Produksi Kayu sebesar **957.583 m3**
 - Sadapan Getah Pinus sebesar **90.551 Ton**
 - Produksi Daun Kayu Putih sebesar **56.892 Ton**



Garis besar kebijakan Perhutanan sosial terhadap Perhutani

- a. Akan ada penataan kembali wilayah kerja Perhutani;
- b. Perhutani fokus pada bisnis yang produktif;
- c. Model Bisnis Perhutani kedepan diharapkan menjadi 3, yaitu :
 - 1) Bisnis Perhutani yang dilakukan sendiri tanpa mitra;
 - 2) Bisnis Perhutani yang dilakukan melalui kerjasama dengan :
 - BUMN
 - Swasta
 - Masyarakat (Koperasi)
- d. Perhutanan Sosial akan dikelola langsung oleh Pemerintah dengan Skema 5 Jari (*Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, HTR, Hutan Adat, Kemitraan Kehutanan*).

2. Rencana Merger Anak Perusahaan Perum Perhutani

Project Basis	Key Issues	Business Vissioning	Action Plan
<p>UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja PP No.23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.</p> <p>Salah satu dari 88 Project Strategis (SDU) KBUMN dalam hal Inovasi Model Bisnis BUMN dan rasionalisasi jumlah Perusahaan BUMN.</p> <p>Inisiatif strategis dalam RJPP Perhutani 2020-2024 untuk meningkatkan <i>product focus</i> dan mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat organizational silos dan sinergi yang belum optimal antar grup Perhutani. Terdapat 3 anak perusahaan (BUMNHL, IHT II & IHT III) sedang mengalami kesulitan likuiditas dan dalam posisi merugi sehingga kesulitan dalam pencarian pendanaan dari perbankan. Mayoritas perusahaan benchmark menggunakan struktur korporasi berdasarkan kesamaan <i>value chain</i> dan produk 	<ul style="list-style-type: none"> Integration : meningkatkan fokus bisnis & sinergi; induk berfokus pada aspek <i>people & planet</i>, AP berfokus pada <i>process, product & profit</i>. Efficiency : mempertahankan struktur eksisting dan berfokus pada efisiensi biaya untuk meningkatkan daya saing. Growth : penambahan portofolio bisnis baru melalui pembentukan SBU / anak usaha. 	<ul style="list-style-type: none"> Merger : <ul style="list-style-type: none"> Inhutani I-III dengan Inhutani I sebagai <i>surviving entity</i> yang berfokus pada produk kayu dan turunannya. Inhutani IV, V dan PT PAK dengan Inhutani V sebagai <i>surviving entity</i> yang berfokus pada produk non kayu. Spin-off bisnis ekowisata Perhutani dan Inhutani I secara bertahap ke Palawi Risorsis. Likuidasi PT Bakti Usaha Menanam Nusantara Hijau Lestari

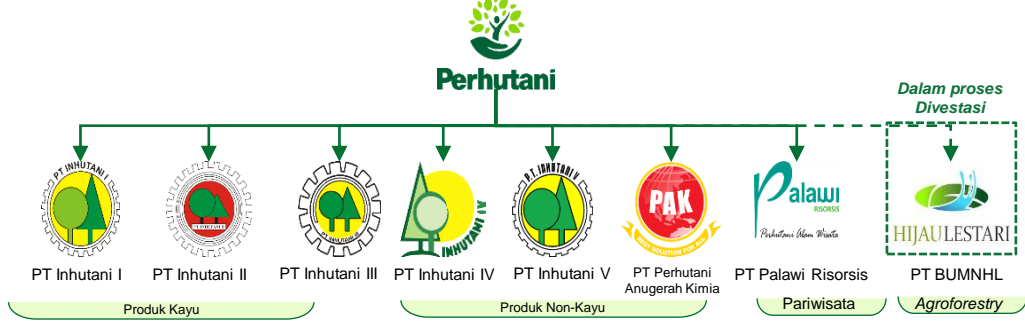


Kajian Kelayakan Merger

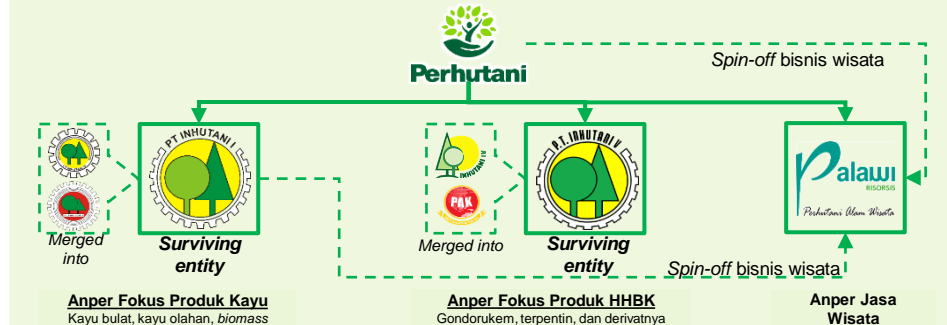
- * Konsultan : Bahana
- Nilai NPV pasca merger positif: IHT I :Rp.424M, IHT V Rp.82M
- potensi pemanfaatan lahan yang dapat dikembangkan setelah dilakukannya merger berupa Pengembangan tanaman Agroforestry & perdagangan karbon.
- Saham seri A diusulkan diproses setelah selesainya proses merger.
- Izin pemanfaatan hutan di kawasan hutan lindung dan hutan produksi dinyatakan tetap berlaku sampai batas waktu yang diberikan dan disesuaikan dengan PP No. 23/2021. (vide Pasal 297 huruf a PP No. 23/2021)
- Pemindahtanganan PBPH (Permen LHK No. 8/2021) sudah diproses
- Perkara Hukum di AP dalam proses penyelesaian & akan dilimpahkan ke *Surviving Entity* begitu juga terkait PKS dengan pihak ketiga.

- Potensi konsekuensi pajak berdasarkan:
 - Nilai Pasar : Rp. 45,2 M
 - Nilai Buku : Rp. 10,1 M

Struktur Saat Ini



Struktur Akhir - Pasca Regrouping/Merger



Manajemen Risiko

Risiko	Mitigasi
Proses perubahan model bisnis dari <i>management fee</i> menjadi Kelola mandiri terhambat kemampuan personel dan pembiayaan	Perubahan dilakukan secara bertahap dimulai dari proses pemasaran. Untuk memperkuat kemampuan AP (SDM) dalam menjalankan proses bisnisnya dilakukan <i>Cross talent</i> dari induk ke AP .
Cost untuk konsekuensi pajak jika menggunakan nilai pasar akan lebih besar	Pemohonan persetujuan penggunaan nilai buku dalam proses merger
Portofolio bisnis baru yang dikembangkan di AP tidak berjalan lancar.	Pembentukan SBU/ anak usaha bekerjasama dengan pihak lain yang sudah berpengalaman

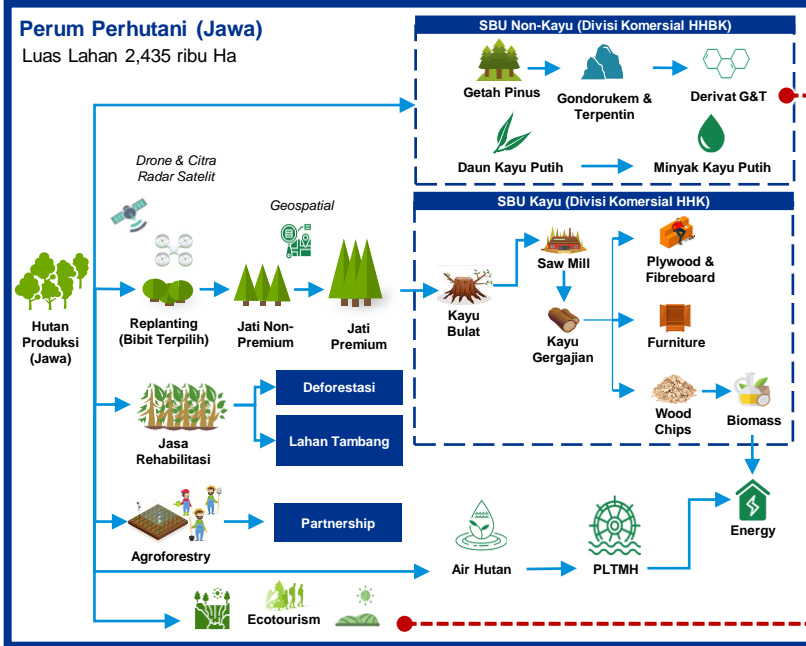
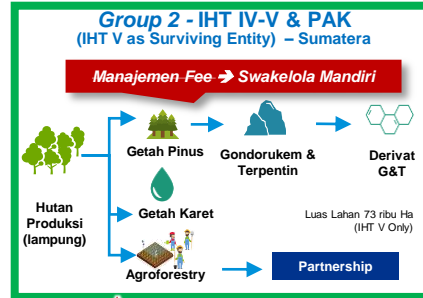
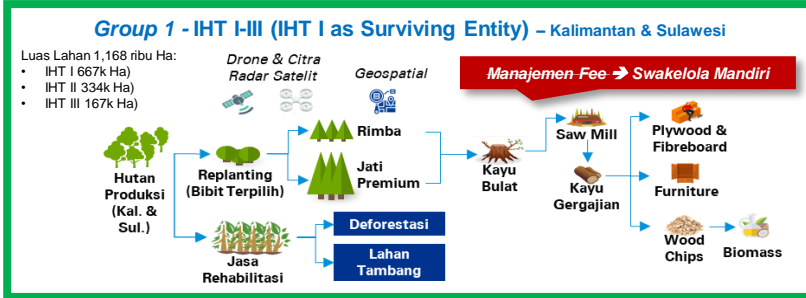
Roadmap Regrouping Anak Perusahaan

2019	2020	2021	2022
Kajian Regrouping <ul style="list-style-type: none"> Aspek Bisnis, Operasional, Finansial dan Legal oleh Bahana Kajian Prtfolio Bisnis oleh Prof. Dr. Dodik Ridho Nurrochmat dari Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB Kajian <i>Spin-off</i> bisnis wisata ke Palawi (KPMG) 	Penyusunan Rencana Regrouping <ul style="list-style-type: none"> Identifikasi Kebutuhan Dukungan Regulasi Menyusun Action Plan Menyusun Manajemem Risiko <ul style="list-style-type: none"> Aspek Bisnis Aspek Operasional Aspek legal Aspek SDM 	Penyampaian usulan Rencana Regrouping kepada Stakeholders <ul style="list-style-type: none"> Usulan Rencanaa merger ke Kementreian KLHK, dan Kementerian BUMN Usulan Likuidasi PT BUMN HL I ke Kementerian BUMN 	Penyelesaian Proses Regrouping Target: Q1 2022 <ul style="list-style-type: none"> Mendapat persetujuan dari pemegang saham dan regulator atas aksi merger AP Proses likuidasi PT BUMNHL <i>Spin-off</i> bisnis wisata ke Palawi. # 24

Sumber: Analisis KPMG, Dokumen RJPP 2020 - 2024

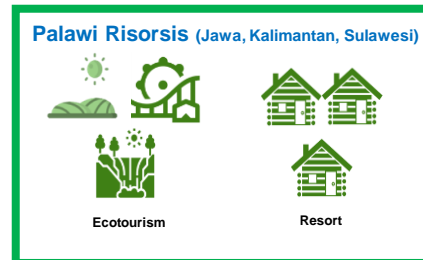
Sumber Dokumen Hasil Kajian Bahana

Value Chain & Produk



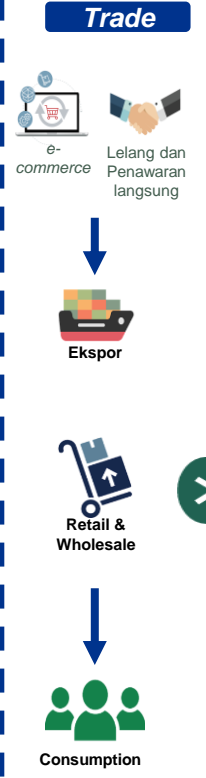
Secara bertahap **Bisnis GTD akan ditangani oleh AP Group 2 (IHT IV, V & PAK)**

- Saat ini sedang dilakukan survey untuk menyusun FS pendirian pabrik PGT di wilayah aceh dengan opsi memindahkan PGT Panninggaran Jawa Tengah - ke Aceh
- Full dikelola AP pada Fase RJPP selanjutnya 2025 - 2030



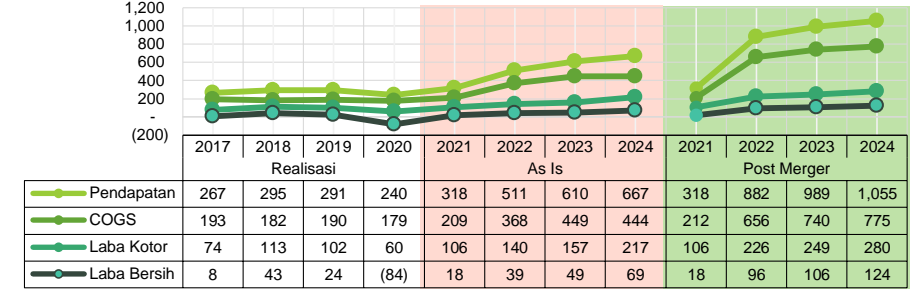
Secara bertahap **Bisnis Wisata akan ditangani oleh Palawi Risorsis**

- Tahap 1 – Obyek wisata prioritas
- Tahap 2 – Wisata rintisan

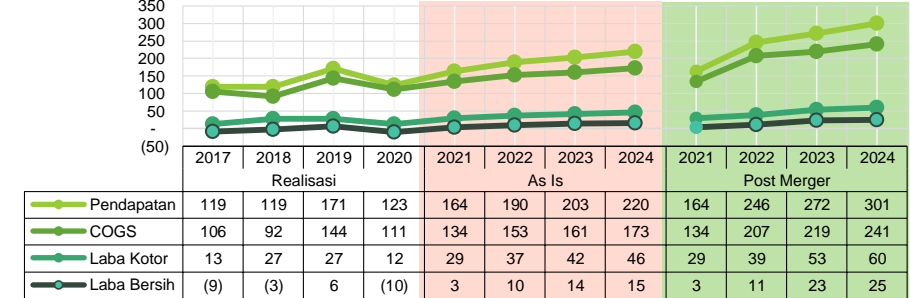


Proyeksi Finansial Pasca Merger

Grup 1 – Kayu (PT. Inhutani I, II dan III)



Grup 2 – Non Kayu (PT. Inhutani V, IV dan PT. PAK)



Kelayakan Merger

Selisih FCFF Post Merger dan Gabungan As Is - Merger IHT I, IHT II dan IHT III

Deskripsi	Unit	30-Nov-21	31-Dec-22	31-Dec-23	31-Dec-24	31-Dec-25	31-Dec-26
Selisih antara FCFF Post Merger dengan As Is	Rp Juta		81.905	46.973	81.639	56.401	45.435
Terminal Value atas Selisih	Rp Juta						638.148
Biaya Pajak Merger	Rp Juta	(9.246)					
Selisih FCFF	Rp Juta	(9.246)	81.905	46.973	81.639	56.401	683.583
Net Present Value atas Post Merger	Rp Juta		615.117				

Selisih FCFF Post Merger dan Gabungan As Is - Merger IHT IV, IHT V dan PAK

Deskripsi	Unit	30-Nov-21	31-Dec-22	31-Dec-23	31-Dec-24	31-Dec-25	31-Dec-26
Selisih antara FCFF Post Merger dengan As Is	Rp Juta		(14.239)	13.268	6.931	9.650	8.275
Terminal Value atas Selisih	Rp Juta						116.228
Biaya Pajak Merger	Rp Juta	(891)					
Selisih FCFF	Rp Juta	(891)	(14.239)	13.268	6.931	9.650	124.503
Net Present Value atas Post Merger	Rp Juta		84.183				



1

Kementerian
Lingkungan Hidup
dan Kehutanan

- Dukungan persetujuan atas permohonan penggabungan PBPH (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan).
- Dukungan persetujuan atas **aksi merger** Inhutani I – III dan merger Inhutani IV, Inhutani V dan PT PAK.

- Sesuai Permen LHK Nomor 08 Tahun 2021 : Usulan penggabungan PBPH dilakukan oleh pemegang izin
 - ✓ Inuhatni I : Surat No.1024/VIII.A/INH/2021 tanggal 16 Juli 2021
 - ✓ Inhutani II : Surat No.012/P/IHT2-DIR/2021 tanggal 16 Juli 2021
 - ✓ Inhutani III : Surat No.0010/IHT3-DIR/2021 tanggal 16 Juli 2021
- FGD pembahasan dengan KLHK tanggal 3 Agustus 2021, dengan hasil perlu melengkapi data-data pendukung yang telah ditindaklanjuti pada tanggal 8 September 2021.
- FGD lanjutan pada tanggal 13-15 Januari 2022, saat ini dalam proses pendalaman oleh KLHK.



2

Kementerian Badan
Usaha Milik Negara

- Dukungan persetujuan atas **aksi merger** Inhutani I – III dan merger Inhutani IV, Inhutani V dan PT PAK.
- Dukungan penerbitan saham seri A
- Dukungan persetujuan atas aksi **Likuidasi** PT BUMNHL

- Surat Direksi Perhutani No.294/001.2/sekper/Dir/2021 tanggal 28 September 2021 perihal Permohonan Persetujuan Restrukturisasi (Merger) Anak Perusahaan.
- Surat Direksi Perhutani No.270/001.2/sekper/Dir/2021 tanggal 3 September 2021 perihal Permohonan Persetujuan Pembubaran (Likuidasi) Anak Perusahaan.
- Surat No.342/001.2/Sekper/2021 dan No.343/001.2/Sekper/2021 tgl 17 Nov 2021 untuk menindaklanjuti surat KBUMN No. S-28/WK1.MBU.C/10/2021 tgl 15 Okt 2021 terkait Pemenuhan Data Rencana Restrukturisasi AP Perum Perhutani.



3

Kementerian Hukum
dan Hak Asasi
Manusia

- Dukungan persetujuan atas akta **merger** Inhutani I-III dan merger Inhutani IV, Inhutani V dan PT PAK.
- Dukungan persetujuan atas **aksi merger**.

- Akan diusulkan setelah mendapat persetujuan Menteri BUMN atas aksi merger Inhutani I – III dan merger Inhutani IV, Inhutani V dan PT PAK.



4

Kementerian
Keuangan

- Dukungan persetujuan atas **penggunaan nilai buku (book value)** terkait pengalihan aset aktiva dan pasiva transaksi merger.
- Dukungan persetujuan **pengalihan hutang SLA** Inhutani II dan Inhutani III kepada Inhutani I sebagai *survival entity*.

- Akan diusulkan setelah mendapat persetujuan Menteri BUMN atas aksi merger.
- Akan diusulkan setelah proses pengusulan penerbitan akte merger dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mendapat persetujuan



5

Badan Pemeriksa
Keuangan dan
Pembangunan

- Dukungan review dan pemberian opini/rekomendasi terhadap rencana Likuidasi PT Bakti Usaha Menanam Nusantara Hijau Lestari (BUMNHL)

- Surat Direksi Perhutani No.0218/001.6/ SEKPER/2021 tanggal 14 Juli 2021 hal Permohonan Kajian Terhadap Rencana Pembubaran (Likuidasi) Anak Perusahaan Perum Perhutani (PT. BUMNHL I)
- Surat Deputi Kepala BPKP No.SP-1153/D4/01/2021 tanggal 27 Oktober 2021 perihal Laporan hasil Reviu atas Rencana Pembubaran (Likuidasi) Anak Perusahaan Perum Perhutani (PT BUMNHL I) dengan hasil : "Secara aspek Governance, dan Risk Management dan Compliance Perhutani telah memenuhi"

1. Dukungan terhadap implementasi 9 proyek strategis Tahun 2022 yang telah ditetapkan Pemilik Modal.
2. Dukungan terhadap pengembangan Multi Usaha Kehutanan
 - berkaitan dengan keringanan PNBP untuk produk agroforestry
 - fasilitasi pendanaan dan sarana produksi pertanian untuk budidaya Multi Usaha Kehutanan yang bermitra dengan entitas bisnis masyarakat desa hutan.
3. Dukungan terhadap keberlangsungan usaha (*Going Concern*) Perum Perhutani setelah penetapan KHDPK, yang saat ini sedang berproses.

BUMN UNTUK
INDONESIA



Perhutani

Jati Negeri Pertiwi

TERIMA KASIH